Harian
JAYA POS
Perubahan Menuju Kemajuan

TERVERIFIKASI DEWAN PERS

PEMBINA :
Letjend TNI (Purn) Dr. SUTIYOSO
Mayjen TNI (Purn) Dr. SAURIP KADI, S.E.,MM., MBA.
Pendiri, Pemimpin Redaksi/
Penanggung Jawab :
TONI LIMBONG, SH.

REDAKSI:
Jl Komplek Depag Blok G2 No.83
RT012 RW003 Kelurahan Kedaung,
Kaliangke, Jakarta Barat,
Telp: (021) 23095745
Email: harianjayapos@yahoo.co.id

SENIN: EDISI 854 TAHUN XIX, 18 - 23 AGUSTUS 2026 | www.harianjayapos.com | HARGA: @Rp.18.000,- LUAR JAWA + ONGKOS KIRIM

Mediasi Pantai Remis Berujung Kesepakatan, Pemilik Lahan Hibahkan Jalan 4 Meter

Deli Serdang, Jaya Pos

Persoalan akses jalan menuju objek wisata Pantai Remis di Dusun IV, Desa Rugemuk, Kecamatan Pantai Labu, Deli Serdang, akhirnya menemukan titik terang.

Pemilik lahan, Parman Ngasip, sepakat menghibahkan akses jalan selebar 4 meter kepada Pemerintah Desa untuk digunakan sebagai jalan menuju kawasan

▸▸ Halaman 5

Pemilik lahan, Parman Ngasip.(dok ist)

Jembatan Garuda dan Fasilitas Air Bersih Diresmikan, Bupati Simalungun Apresiasi Sinergi TNI-Polri

Simalungun, Jaya Pos

Bupati Simalungun Dr. H. Anton Achmad Saragih bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menghadiri peresmian Jembatan Garuda TNI-Polri dan fasilitas air bersih TNI Angkatan Darat (AD), Kamis (13/8/2026).

Peresmian dilakukan Presiden RI Prabowo Subianto secara daring dari Istana Negara. Di Kabupaten

▸▸ Halaman 5

Bupati Simalungun, Hadir dalam Acara Peresmian Jembatan Garuda, Air Bersih Oleh Presiden RI. (Foto/Rd)

TPS ILEGAL DI JAKARTA DISOROT
Pramono Anung Ancam Cabut Izin Perusahaan

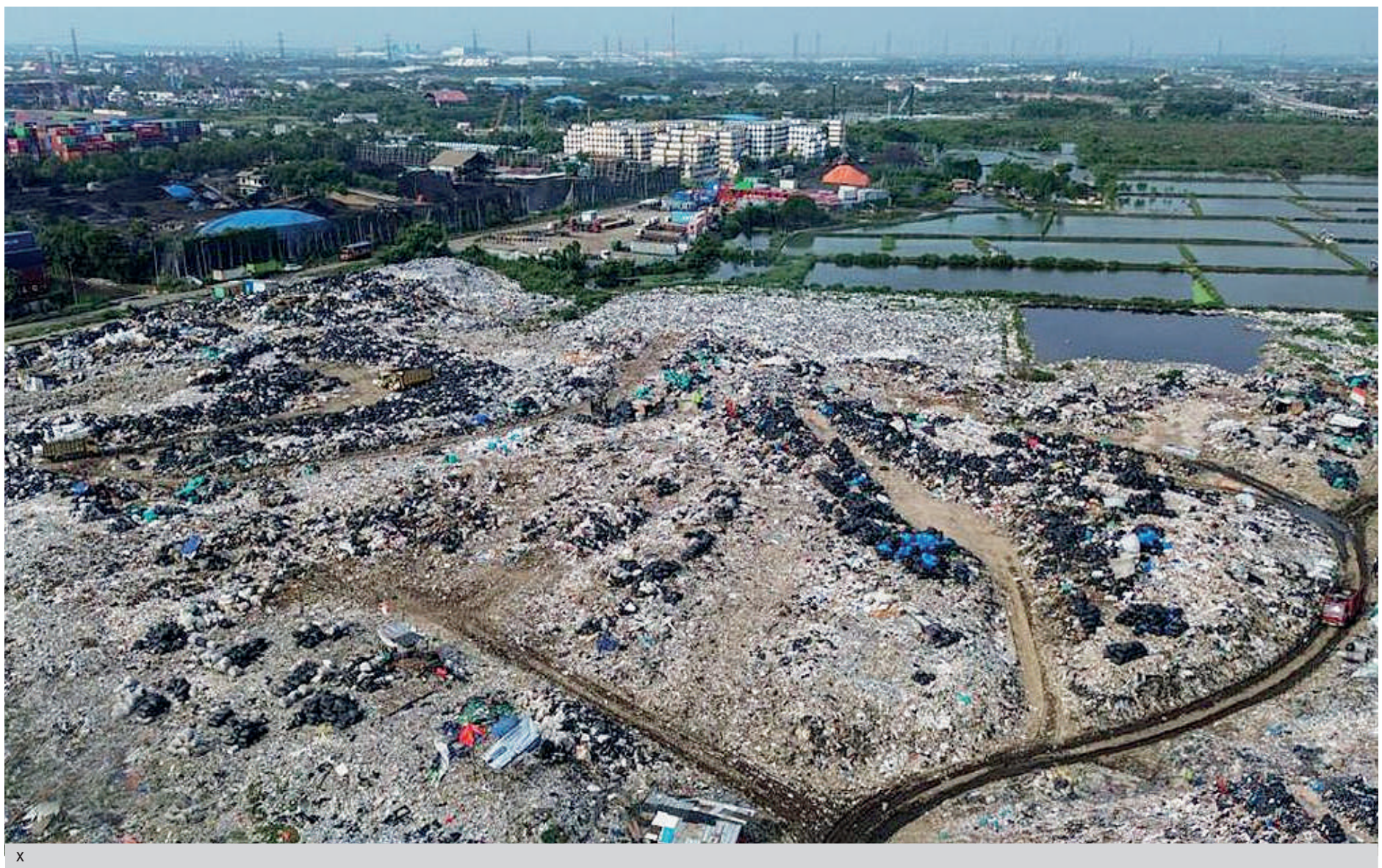
x

> Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengancam menutup dan mencabut izin perusahaan yang terbukti terlibat pembuangan sampah ilegal di Nagrak, Cilincing, Jakarta Utara. Langkah itu diambil menyusul maraknya TPS ilegal yang dinilai mengancam lingkungan dan kesehatan warga.

Jakarta, Jaya Pos

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung berjanji menindak tegas pengelola dan pihak yang membuang sampah secara ilegal, termasuk aktivitas pembuangan sampah di kawasan Nagrak, Cilincing, Jakarta Utara.

Pramono bahkan mengancam mencabut izin perusahaan yang selama ini menggunakan jalur ilegal untuk membuang sampah hotel, restoran, dan kafe (horeka).

"Saya sudah minta kepada jajaran Balai Kota, termasuk Dinas LH, Kominfotik, dan sebagainya. Yang pertama diumumkan, yang kedua di-

▸▸ Halaman 5

Pemko dan Kodam XX/TIB Hijaukan Kawasan Bekas Galodo dengan Bambu dan Pohon Produktif

Padang Panjang, Jaya Pos

Upaya memulihkan kawasan terdampak bencana galodo (banjir bandang) terus dilakukan Pemerintah Kota Padang Panjang bersama jajaran TNI. Kawasan Jembatan Kembar, Kelurahan Silaing Bawah, yang sebelumnya terdampak galodo, mulai dihijaukan kembali melalui penanaman bambu dan berbagai jenis pohon produktif, Rabu (12/8/2026).

Kegiatan penghijauan tersebut digelar secara serentak dalam rangka memperingati HUT ke-1 Kodam XX/TIB. Namun, lebih dari sekadar rangkaian peringatan hari jadi, penanaman pohon ini menjadi bagian dari langkah nyata pemulihan lingkungan pascabencana sekaligus membangun kembali kawasan agar lebih hijau, asri, dan memiliki nilai manfaat bagi masyarakat.

Wali Kota Padang Panjang Hendri Arnis menyambut positif kegiatan tersebut. Menurutnya, penghijauan di kawasan bekas bencana merupakan langkah penting untuk mengembalikan kondisi lingkungan sekaligus meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kelestarian alam.

"Alhamdulillah, hari ini kita bersama-sama melakukan penanaman pohon di kawasan yang tahun lalu terdampak galodo. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini, kawasan ini bisa kembali hijau dan kondisi lingkungannya semakin baik," ujar Hendri.

Ia menegaskan, keberhasilan program penghijauan tidak cukup

▸▸ Halaman 5

Pemerintah Kota Padang Panjang bersama Kodam XX/TIB menanam bambu \ dan berbagai pohon produktif. (Foto: Ist)

Ezechiel N'douassel

Resmi Berseragam PSGC Ciamis

Ciamis, Jaya Pos

PSGC Ciamis terus mematangkan kekuatan dalam menghadapi sengitnya persaingan Liga 2 musim 2026/2027, baru-baru ini klub berjuluk Laskar Singacala telah resmi mengontrak sembilan pemain anyar.

Langkah berani manajemen mendatangkan kejutan besar dengan mendaratkan juru gedor asal Chad, Ezechiel N'douassel. Eks bomber Persib Bandung tersebut dipastikan kembali meramaikan panggung sepak bola Indonesia.

Tidak cuma Ezechiel, aroma Maung Bandung kian kental di Stadion Galuh. Hal itu lantaran PSGC turut mengamankan beberapa pemain yang direkomendasikan klub kebanggaan Jawa Barat tersebut.

Tiga diantaranya ialah mantan penggawa Pangeran Biru yakni Yandi Sofyan (striker Persib era 2015), Ferdiansyah (alumni akademi Persib yang sempat dipinjamkan ke Semen Padang), serta Ahmad Baasith, gelandang ciamik yang sudah tidak asing bagi publik Ciamis karena pernah berkostum Laskar Singacala.

Kehadiran sosok muda berprospek cerah juga menjadi warna tersendiri. PSGC Ciamis juga berhasil menggaet Darrell Nathan Ang, talenta didikan akademi Sevilla. Darrel sempat merumput di Liga Brasil sebelum memutuskan kembali ke tanah air.

▸▸ Halaman 5

PSGC Ciamis resmi mengontrak 9 pemain, termasuk Ezechiel N'douassel. (Foto: Mamay)

Lahan Pertanian di Desa Pantik, yang diduga telah dicaplok oleh PT.SYK (Foto dok : Jaya Pos)

PT SYK Diduga Alih Fungsikan Ratusan Hektare Lahan Pertanian di Belanti Siam 2 Menjadi Kebun Sawit

Palangka Raya, Jaya Pos s

Dugaan alih fungsi lahan pertanian produktif menjadi perkebunan kelapa sawit kembali mencuat di Kalimantan Tengah. PT Sepalar Yasa Kartika (SYK), perusahaan perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di wilayah Kecamatan Bataguh, Kabupaten Kapuas, diduga menguasai dan mengalihfungsikan lahan pertanian di Desa Pantik, kawasan Belanti Siam 2, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau, menjadi areal perkebunan kelapa sawit.

Informasi yang dihimpun Jaya Pos menyebutkan, lahan yang diduga dialihfungsikan tersebut merupakan kawasan pertanian yang dinilai memiliki potensi strategis dan berada pada lokasi yang telah dikembangkan sebagai lahan pertanian.

Yang menjadi sorotan bukan semata-mata perubahan fungsi lahan, tetapi juga status, legalitas penguasaan, perizinan, serta dampak terhadap sistem irigasi dan kepentingan pertanian masyarakat.

Berdasarkan informasi yang diperoleh, terdapat sekitar 140 hektare lahan pertanian yang diduga telah dialihfungsikan menjadi perkebunan kelapa sawit. Lahan tersebut disebut-sebut berkaitan dengan aset negara atau Barang Milik Negara (BMN), sehingga apabila benar, perubahan peruntukannya perlu mendapat perhatian serius dari instansi berwenang.

▸▸ Halaman 5

Layanan Publik Polres Trenggalek Terima Anugrah Predikat Pelayanan Prima

Trenggalek, Jaya Pos

Sejumlah pos layanan publik Polres Trenggalek dinyatakan layak mendapatkan predikat pelayanan prima kategori A. Diantaranya, sektor SKCK, Satpas SIM, pelayanan Satreskrim dan SPKT.

Jenjang penilaian ini menunjukkan bahwa instansi dimaksud telah menerapkan seluruh aspek secara sempurna, konsisten dan melampaui harapan masyarakat. Dengan nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP) berada pada rentang 4,51 hingga 5,00.

Piagam penghargaan dengan nomor Kep/666/V/2026 itu ditanda tangani langsung oleh Kapolri, Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dan diberikan kepada Polres Trenggalek, Polda Jawa Timur.

Diserahkan saat gelaran Rakor Perencanaan dan Penganggaran Polda Jatim di Rayz UMM hotel Malang, Kamis 13 Agustus 2026.

Dikonfirmasi JAYA POS, Kapolres Trenggalek AKBP Rizky Tri Putra Erryka Adi Wijaya mengatakan jika prestasi yang diterima merupakan hasil kerja keras seluruh petugas. Atas konsistensi dan profesionalismenya dalam memberikan yang terbaik kepada khalayak.

Perwakilan Polres Trenggalek usai terima penghargaan predikat pelayanan prima kategori A. (Foto: ist)

"Beberapa tahun terakhir, Polres Trenggalek mampu mempertahankan predikat pelayanan prima atau kategori A. Ini adalah prestasi yang luar biasa, selayaknyalah diapresiasi bersama," sebut Kapolres.

Ditambahkan oleh dia, torehan prestasi tersebut hendaknya tidak menjadikan lengah dan berbesar hati. Tetapi justru lebih memicu energi baru, sehingga terus berbenah dan meningkatkan kualitas diri. Melalui berbagai inovasi maupun terobosan kreatif baru guna mendongkrat tingkat kepuasan publik.

"Penghargaan ini kami persembahkan untuk seluruh warga Bumi Menak Sopal. Bertepatan pula dengan hari jadi ke-832 Kabupaten Trenggalek. Semoga ke depan Polres Trenggalek semakin maju selarasan dengan kualitas pelayanan publik yang semakin meningkat," harapnya. **(HWi)**

Minimalisir Penyimpangan Rekrutmen Perangkat Desa
Pemkab Trenggalek Wacanakan Penggunaan CAT

Bupati Trenggalek, Mochammad Nur Arifin.(Foto: dok)

Trenggalek, Jaya Pos

Demi transparansi dan meminimalisir potensi penyimpangan, Pemkab Trenggalek mendorong pelaksanaan rekrutmen perangkat desa dilakukan dengan sistem Computer Assisted Test (CAT).

Wacana tersebut bukan dimaksudkan untuk mengambil alih kewenangan desa, namun lebih kepada penyesuaian standarisasi. Mengingat, selama ini dalam beberapa kasus (proses seleksi perangkat desa) telah memunculkan permasalahan bahkan memicu konflik.

Hal tersebut sebagaimana disampaikan Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin kepada awak media, bahwa sistem yang sudah berjalan perlu dikaji ulang. Sebab, sering kali menimbulkan persoalan-persoalan baru di tengah masyarakat.

"Pada prinsipnya penggunaan CAT bukan untuk menarik itu menjadi kewenangan daerah. Tetapi lebih kepada langkah antisipasi dalam meminimalkan persoalan," sebutnya, Kamis 13 Agustus 2026.

Menurut Gus Ipin, sapaan akrab bupati muda ini, dengan penggunaan sistem berbasis teknologi terpusat maka tingkat kepercayaan publik semakin tinggi. Selain juga, dapat memperkuat objektifitas hasil ujian bagi para peserta.

Pasalnya, dari beberapa pengalaman yang ada ketika menggunakan pola tes manual sering terjadi kecurangan.

"Agar lebih fair, pemerintah mendorong mulai tahun ini bisa dengan CAT," tandas bupati.

Pun begitu, lanjut dia, praktik penggunaan sistem komputer terintegrasi (CAT) belum bisa serta merta diimplementasikan bersamaan disemua desa. Karena kekosongan pada posisi aparatur tidak mungkin sama ditiap wilayah.

Jadi, jadwal pengisiannya tetap menyesuaikan kebutuhan masing-masing. Dengan mekanisme pelaksanaannya tetap menjadi kewenangan pemerintah desa dan pengawasan dari kecamatan.

"Masa jabatan perangkat berbeda-beda. Tetap disesuaikan kebutuhan masing-masing," imbuhnya.**(HWi)**

Safari Politik DPW NasDem Jabar, Usung Toto Marwoto Menjadi Wakil Bupati Ciamis

Ciamis, Jaya Pos

Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai NasDem Jawa Barat memberi sinyal hijau dan merestui Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Ciamis, Toto Marwoto, untuk maju mengisi kekosongan posisi Wakil Bupati Ciamis jika direkomendasikan.

Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan konsolidasi partai dan bedah daerah pemilihan (dapil) yang dihadiri jajaran pengurus DPW NasDem Jabar dan DPD NasDem Kabupaten Ciamis serta Kota Banjar. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian safari politik DPW NasDem ke-22 kabupaten/kota di Jawa Barat guna memperkuat struktur serta memetakan potensi politik menjelang Pemilu 2029.

Kegiatan konsolidasi partai dan bedah daerah pemilihan (dapil) yang dihadiri jajaran pengurus DPW NasDem Jabar dan DPD NasDem Kabupaten Ciamis serta Kota Banjar. (Foto:Mamay)

Ketua DPW Partai NasDem Jawa Barat, Drs. H. Mamat Rachmat, menyatakan bahwa pihaknya menyerahkan keputusan sepenuhnya terkait pengisian posisi Wakil Bupati kepada Bupati Ciamis, sembari menegaskan kesiapan kader NasDem jika dibutuhkan. "Terkait wakil bupati, kita serahkan ke beliau (Bupati Ciamis) saja, bagaimana beliau untuk mendampingi atau siapa yang mendampingi. Kami tidak responsif, tapi kami dari NasDem menunggu permintaan beliau sebagai bupati. Kalau misalkan nanti Pak Bupati meminta kader dari NasDem yang terbaik, ya kita kasihkan kader terbaik," ujar Mamat Rachmat.

Selain membahas bursa Wakil Bupati, agenda bedah dapil tersebut difokuskan pada evaluasi perolehan suara Pemilu 2024 sebagai pemetaan awal menuju 2029. DPW NasDem Jabar mendorong peningkatan perolehan kursi DPRD Kabupaten Ciamis yang saat ini meraih 4 kursi. "Perbaikan pertama dari hasil mapping, sekarang DPD Kabupaten Ciamis baru meraih 4 kursi, target ke depan menjadi 6 kursi. Minimalnya satu dapil satu kursi dan maksimalnya 8 kursi berdasarkan road map dan data Pemilu 2024," jelas Mamat Rachmat.

Saat ditanya mengenai sosok Toto Marwoto sebagai calon yang diusung, Mamat mengamini potensi Ketua DPD NasDem Ciamis tersebut. "Kalau Pak Toto kan kader terbaik, Ketua DPD, bisa-bisa saja," katanya.

Menanggapi restu dan dorongan tersebut, Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Ciamis, Toto Marwoto, menyatakan kesiapannya untuk menjalankan amanat dan keputusan partai. "Tadi sudah disampaikan oleh Ketua DPW bahwa Partai NasDem punya kader terbaik. Pada prinsipnya, kita ini sebagai satu kepercayaan. Apapun bentuk dari sebuah political will dari DPP maupun DPW, kita siap," tegas Toto Marwoto.

Dikatakannya, bahwa hasil pemetaan ini akan dijadikan acuan untuk memperbaiki kelemahan strategi pada pemilu sebelumnya. "Kita memang butuh sebuah pola atau model yang harus kita tingkatkan dari apa yang kita lihat sebagai kelemahan di 2024, kemudian dilakukan pemulihan (recovery) untuk Pemilu 2029," tandas Toto. **(Mamay)**

Perkuat Birokrasi Guna Terwujudnya Visi Daerah, 327 Pejabat Administrator dan Pengawas Dilantik

Sukabumi, Jayapos

Sebanyak 327 pejabat administrator dan pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi resmi dilantik dan diambil sumpah jabatannya. Pelantikan dipimpin Bupati Sukabumi H Asep Japar di Alun-alun Gadobangkong Palabuhanratu, Senin (10/8/2026).

Pelantikan tersebut menjadi bagian dari upaya Pemkab Sukabumi memperkuat birokrasi sekaligus mendukung terwujudnya visi daerah, yakni Kabupaten Sukabumi yang Maju, Unggul, Berbudaya, dan Berkah (Mubarakah).

Dalam arahannya, Bupati H Asep mengingatkan para pejabat bahwa jabatan bukan sekadar posisi struktural, tetapi amanah yang harus dijalankan dengan disiplin, integritas, profesionalisme, dan tanggung jawab.

Bupati meminta pejabat yang baru dilantik membangun hubungan kerja yang baik dengan atasan maupun bawahan. Seorang pemimpin, kata dia, harus memiliki etika, mampu bekerja sama, dan tidak merasa lebih tinggi dari bawahannya.

"Jangan merasa lebih tinggi dari bawahan. Kita semua punya tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," ujarnya.

Bupati Sukabumi H.Asep Japar Melantik 327 Pejabat di Lingkungan Pemkab Sukabumi. (Foto/Diskominfo)

Di tengah kondisi anggaran yang terbatas, H Asep meminta para aparatur sipil negara tidak menjadikan keterbatasan tersebut sebagai alasan menurunnya kualitas pelayanan publik.

Menurutnya, efisiensi anggaran harus berjalan beriringan dengan kreativitas dan inovasi. Dengan begitu, pelayanan kepada masyarakat tetap optimal meski pemerintah daerah menghadapi keterbatasan fiskal.

Selain itu, Bupati menyampaikan bahwa sejumlah jabatan diperkirakan kosong pada 2027 mendatang. Ia meminta seluruh ASN memanfaatkan peluang tersebut dengan meningkatkan kompetensi, menjaga integritas, serta menunjukkan kinerja terbaik. **(YUD)**

Perkuat Budaya Literasi
Unpad Salurkan Hibah Buku ke Komunitas Gada Membaca

Ciamis, Jaya Pos

Kantor Pengelolaan Perpustakaan Direktorat Pendidikan Non Gelar Universitas Padjadjaran (Unpad) menyalurkan hibah buku kepada Komunitas Gada Membaca di Kabupaten Ciamis, beberapa waktu lalu.

Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya memperkuat budaya literasi sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap bahan bacaan. Kunjungan dipimpin Kepala Kantor Pengelolaan Perpustakaan Direktorat Pendidikan Non Gelar Unpad, Dr. Ute Lies Siti Khadijah, S.Sos., M.Si., didampingi pustakawan Sri Rakhmiyati, S.Sos., M.I.Kom., Ziani Marni, S.S.I. dan Naafa Naafiatul Insi, S.S.I.

Pihak Unpad diterima langsung oleh Ketua Komunitas Gada Membaca, Agus Munawar, beserta para pengurus dan pegiat literasi setempat. Ute mengatakan, kolaborasi dengan komunitas literasi menjadi salah satu langkah penting dalam memperluas jangkauan layanan dan manfaat perpustakaan bagi masyarakat. Menurutnya, keluarga dan komunitas memiliki peran strategis dalam menanamkan budaya membaca sejak dini. Dengan dukungan berbagai pihak, upaya membangun masyarakat yang gemar membaca dapat dilakukan secara berkelanjutan.

Sementara Ketua Komunitas Gada Membaca, Agus Munawar, menyambut baik dukungan yang diberikan Unpad melalui hibah buku tersebut. Koleksi buku yang diterima akan dimanfaatkan untuk mendukung berbagai kegiatan belajar dan literasi bagi anak-anak maupun masyarakat di lingkungan sekitar.

Selain penyerahan hibah buku secara simbolis, kegiatan juga diisi dengan diskusi mengenai penguatan budaya literasi di masyarakat. Diskusi mempertemukan pengelola perpustakaan, pegiat literasi dan masyarakat untuk berbagi pengalaman terkait tantangan serta strategi dalam meningkatkan minat baca di tengah perkembangan teknologi digital.

Dalam diskusi tersebut, sejumlah isu menjadi perhatian bersama, di antaranya pengembangan ruang baca yang inklusif dan ramah bagi seluruh kalangan, pentingnya membangun kebiasaan membaca sejak usia dini, serta pemanfaatan teknologi untuk mendukung kegiatan literasi.

Melalui kegiatan ini, Unpad menunjukkan komitmennya dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan dan literasi masyarakat. Kolaborasi dengan komunitas literasi diharapkan dapat memperluas akses pengetahuan, menumbuhkan budaya membaca, serta memperkuat peran masyarakat dalam menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan berkelanjutan. **(Mamay)**

Kantor Pengelolaan Perpustakaan Direktorat Pendidikan Non Gelar Universitas Padjadjaran menyalurkan hibah buku kepada Komunitas Gada Membaca di Kabupaten Ciamis. (Foto:Mamay)

Pengistrenan Raden Rafiq Hakim Radinal

Sebagai Wawakil Kerajaan Galuh di Keraton Selagangga

Pengukuhan Raden Rafiq Hakim Radinal sebagai Wawakil Kerajaan Galuh. (Foto: Mamay)

Ciamis, Jaya Pos

Bupati Ciamis, H. Herdiat Sunarya menghadiri kegiatan Pengistrenan Wawakil Kerajaan Galuh, Raden Rafiq Hakim Radinal yang berlangsung di Keraton Selagangga, Kelurahan Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, Sabtu (8/8).

Acara yang bertajuk Galuh Galihna Galih ini turut dihadiri oleh jajaran Pemerintah Kabupaten Ciamis, tokoh adat, serta deretan budayawan Tatar Galuh Ciamis dan juga Forum Silaturahmi Keraton Nusantara (FSKN).

Bupati Ciamis, menegaskan prosesi adat ini bukan sekadar seremoni simbolis semata. Namun menjadi pijakan strategis dalam merawat dan memajukan peradaban lokal."Pengistrenan ini merupakan momentum penting dalam upaya kita bersama. Terutama untuk terus memajukan kebudayaan dan peradaban di Tatar Galuh," tegas Herdiat dalam sambutannya.

Dikatakannya, momentum ini menjadi ajang refleksi serta napak tilas atas kejayaan Kerajaan Galuh. Menurutnya Kerajaan Galuh telah mewariskan nilai-nilai keutamaan, seperti kearifan lokal dan semangat gotong royong. Nilai-nilai inilah yang hingga kini menjadi fondasi jati diri masyarakat Ciamis.

Dalam kesempatan tersebut, Herdiat merinci kekayaan situs bersejarah yang ada di Ciamis sebagai bukti kebesaran peradaban Galuh. Di antaranya Situs Karangkamulyan, Situs Astana Gede Kawali, Situs Borosngora Panjalu, hingga Situs Jambansari. "Keempat situs tersebut merupakan saksi bisu sekaligus sumber pengetahuan yang tak ternilai harganya. Menggambarkan bagaimana leluhur kita membangun peradaban dengan penuh kearifan, gotong royong, dan penghormatan terhadap alam serta sesama," kata Herdiat.

Herdiat juga menggarisbawahi pentingnya pelibatan generasi muda dalam pelestarian nilai-nilai sejarah. Ia berharap generasi mendatang tidak hanya memandang sejarah Galuh sebagai catatan masa lalu, melainkan sebagai kompas pemandu masa depan. "Generasi muda perlu diberikan ruang dan kesempatan untuk mengenal lebih dalam tentang sejarah Kerajaan Galuh, bukan hanya sebagai pengetahuan masa lalu, tetapi sebagai sumber inspirasi dan kebanggaan dalam membangun masa depan," tegasnya.

Pemerintah Kabupaten Ciamis juga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Forum Silaturahmi Keraton Nusantara (FSKN), Dewan Kebudayaan Kabupaten Ciamis, serta para seniman dan budayawan yang telah bersinergi menyukseskan gelaran ini.

Bupati Ciamis menyampaikan ucapan selamat sekaligus pesan mendalam kepada R. Rafiq Hakim Radinal yang kini mengemban amanah baru. "Semoga amanah yang diemban dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan keteladanan, sehingga mampu menjadi penggerak dalam pelestarian budaya sekaligus menjadi jembatan penghubung antara nilai-nilai luhur masa lalu dengan semangat kemajuan di masa kini dan masa yang akan datang," ujar Herdiat.

Raden Rafiq Hakim Radinal

Sementara itu berdasarkan pantauan japos.co, Raden Rafiq Hakim Radinal resmi menjadi Wawakil Kerajaan Galuh dalam acara prosesi Pengistrenan (Pengukuhan) yang berlangsung di Keraton Selagangga Kelurahan Ciamis Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis, Sabtu (8/8).

Prosesi adat dengan penuh khidmat ini digelar untuk mengukuhkan perwakilan resmi Kerajaan Galuh dalam menjaga kelestarian tradisi dan marwah kebudayaan Sunda. Pengukuhan ini diawali dengan pembacaan deklarasi serta penandatanganan berkas resmi yang disaksikan oleh para pemangku adat, jajaran Dewan Kebudayaan Kabupaten Ciamis, Bupati Ciamis, Herdiat Sunarya dan Ketua DPRD Ciamis, Nanang Permana. Kegiatan tersebut juga turut dihadiri oleh Forum Silaturahmi Keraton Nusantara (FSKN).

Panitia Pelaksana Kegiatan, Jang Harja yang juga akrab disapa Adipati Lokasana menjelaskan, prosesi ini sarat akan simbolik dan nilai filosofis luhur. Sebagai bentuk penghormatan dan permohonan restu (munjung), R. Rafiq Hakim Radinal melakukan sungkem kepada perwakilan keluarga sepuh. "Setelah permohonan restu, dilanjutkan dengan prosesi cipratan air. Air ini diambil dari puluhan air keramat di seluruh wilayah Galuh Pangauban. Mulai dari Ciamis, Banjar, Pangandaran, hingga Kawasen yang disatukan. Ini melambangkan restu menyeluruh dari para leluhur serta kasepuhan di Tatar Galuh," jelasnya.

Menurutnya, kegiatan ini juga memegang teguh falsafah Sunda Tri Tangtu di Buana (Ratu, Rama, Resi). Simbol-simbol kepemimpinan adat turut diserahkan dalam pengukuhan tersebut. Termasuk pemberian Bendo oleh Bupati Ciamis, sebagai simbol mahkota dan kepemimpinan Ratu.

Kemudian dilanjutkan dengan penyerahan Keris Galuh oleh Ketua DPRD Ciamis, Nanang Permana. Keris ini merupakan lambang pusaka turun-temurun dari unsur Rama atau Kasepuhan. "Selanjutnya penyerahan Pataka oleh Kang Yat Rospia Brata sebagai simbol martabat kehormatan Galuh," jelas Jang Harja.

Jang Harja menegaskan, pengukuhan Wawakil Kerajaan Galuh ini krusial untuk mengisi kekosongan figur perwakilan. Selama dua tahun terakhir Wawakil Kerajaan Galuh kosong pasca meninggalnya Raden Hanif Radinal. Rafiq Hakim Radinal sendiri merupakan adik dari Hanif Radinal. Keduanya merupakan keturunan Bupati Galuh Raden Adipati Aria Kusumadiningrat dari istrinya, Pit Nio atau Raden Ayu Dwitajuningrat.

Pengukuhan Wawakil, lanjut dia, mendesak dilakukan agar Kerajaan Galuh kembali memiliki representasi di kancah nasional maupun internasional. Khususnya di kawasan Asia Tenggara melalui Forum Silaturahmi Keraton Nusantara (FSKN). **(Mamay)**

Kejari Depok Tetapkan Tersangka Baru Korupsi Proyek Antena RRI Rp26,39 Miliar

Kejari Depok Tetapkan Tersangka Baru Korupsi Pengadaan Antena RRI Cimanggis. (Foto : Joko Warihnyo)

Depok, Jaya Pos

Kejaksaan Negeri (Kejari) Depok kembali menetapkan tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan pemancar siaran luar negeri berupa Antena Rotable Log Periodic di Kantor Pusat Lembaga Penyiaran Publik (LPP) Radio Republik Indonesia (RRI), Cimanggis, Kota Depok, tahun anggaran 2021.

Tersangka baru berinisial S, yang pada saat proyek berlangsung menjabat sebagai Kepala Bidang Informasi Teknologi Direktorat Teknologi dan Media Baru LPP RRI periode 2019–2021. S juga diketahui menjabat sebagai Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang dan Jasa LPP RRI.

Kepala Seksi Intelijen Kejari Depok, Barkah Dwi Hatmoko, mengatakan penetapan S sebagai tersangka dilakukan setelah tim penyidik memperoleh sejumlah alat bukti yang dinilai cukup untuk mengungkap dugaan tindak pidana dalam proyek tersebut.

"Dalam perkara ini sudah ada tiga tersangka yang ditetapkan oleh Tim Penyidik Kejari Depok," kata Barkah Selasa (11/8/2026).

Sebelum S ditetapkan sebagai tersangka, penyidik telah menetapkan dua orang lainnya, yakni W selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan M selaku Direktur PT CPM yang merupakan penyedia barang dan jasa dalam proyek tersebut.

Barkah mengungkapkan, S diduga memiliki peran dalam penetapan PT CPM sebagai penyedia barang dan jasa, meskipun perusahaan tersebut diduga tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam proses pengadaan.

"S diduga melakukan perbuatan dengan menetapkan PT CPM sebagai penyedia barang dan jasa, meskipun perusahaan tersebut dinilai tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam proses pengadaan," ungkap Barkah.

Menurut dia, penetapan perusahaan tersebut sebagai penyedia diduga dilakukan dengan cara mengondisikan PT CPM seolah-olah telah memenuhi persyaratan kualifikasi maupun ketentuan dalam proses pengadaan barang dan jasa.

"Penetapan PT CPM sebagai penyedia, diduga dilakukan dengan cara mengondisikan perusahaan tersebut seolah-olah telah memenuhi persyaratan kualifikasi dan ketentuan pengadaan," sambungnya.

Pembayaran 100 Persen, Pekerjaan Diduga Baru 1,79 Persen Perkara ini mencuat dalam proyek pengadaan antena pemancar siaran luar negeri dengan nilai kontrak mencapai Rp26,39 miliar.

Dalam proses penyidikan, proyek tersebut diduga menyisakan sejumlah persoalan. Salah satunya berkaitan dengan pembayaran pekerjaan yang disebut telah terealisasi 100 persen, sementara progres pengerjaan di lapangan diduga baru mencapai 1,79 persen.

Penyidik juga menduga terdapat mark up anggaran serta indikasi suap atau gratifikasi dalam pelaksanaan proyek tersebut.

Akibat dugaan perbuatan para tersangka, negara disebut mengalami kerugian keuangan. Namun, hingga kini besaran kerugian negara masih dalam proses penghitungan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Barat.

Dalam rangka kepentingan penyidikan, Kejari Depok telah melakukan penahanan terhadap tersangka W dan S selama 20 hari, terhitung sejak 6 Agustus 2026.Keduanya kini ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Depok.

"Untuk kepentingan penyidikan, penyidik Kejari Depok melakukan penahanan terhadap tersangka W dan S selama 20 hari terhitung sejak 6 Agustus 2026. Keduanya ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Depok," beber Barkah.

Sementara itu, tersangka M, yang merupakan Direktur PT CPM, belum dilakukan penahanan. M juga diketahui tidak memenuhi panggilan pemeriksaan sebagai tersangka yang dijadwalkan pada Kamis (6/8/2026)

Kejari Depok mengimbau M untuk bersikap kooperatif dan memenuhi proses pemeriksaan. Sikap tersebut dinilai penting untuk mendukung kelancaran penyidikan serta proses hukum yang tengah berjalan.

Atas dugaan perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar Pasal 603 KUHP juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 20 huruf c KUHP.

Selain itu, para tersangka juga disangkakan secara subsidiair melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 20 huruf c KUHP.

Penetapan tersangka baru ini menambah panjang daftar pihak yang terseret dalam perkara dugaan korupsi proyek pengadaan antena RRI tersebut. Penyidik masih terus mendalami peran masing-masing tersangka, termasuk mengungkap secara utuh dugaan penyimpangan yang menyebabkan proyek bernilai puluhan miliar rupiah itu bermasalah.

(Joko Warihnyo)

Puja Sera Danau Hijau Karimun Resmi Dibuka, Hadirkan Nuansa Voice dan Ragam Kuliner

Karimun, Jaya Pos

Puja Sera Danau Hijau (PSDH) Tanjung Balai Karimun, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau (Kepri), resmi dibuka untuk umum pada Sabtu (15/8/2026). Kehadiran pusat kuliner dan hiburan ini diharapkan menjadi salah satu destinasi baru yang mampu menarik minat masyarakat maupun wisatawan untuk berkunjung ke Bumi Berazam.

Peresmian PSDH dijadwalkan berlangsung mulai pukul 17.00 WIB hingga selesai. Acara tersebut juga akan dimeriahkan penampilan artis dari luar daerah, Nuansa Voice, yang sengaja dihadirkan untuk memberikan suasana berbeda dibandingkan pusat kuliner lainnya yang ada di Karimun.

Dirut CV.Putra Dairi. Maniur Tua Simamora. (Foto/Jonri)

Direktur Utama CV Putra Dairi Karimun sekaligus pemilik Puja Sera Danau Hijau, Maniur Tua Simamora, mengatakan kehadiran PSDH tidak hanya berorientasi pada usaha kuliner, tetapi juga diharapkan dapat menjadi ruang rekreasi dan hiburan bagi masyarakat.

"Bagi warga Karimun yang ingin menyaksikan acara peresmian, kami persilakan untuk datang. Kami ingin para tamu dan pengunjung mendapatkan pengalaman yang menyenangkan sambil menikmati berbagai kuliner yang telah kami sediakan," ujar Maniur Tua Simamora kepada JAPOS.CO, Kamis (13/8/2026).

Menurutnya, konsep PSDH dirancang dengan menghadirkan perpaduan kuliner dan hiburan. Kehadiran Nuansa Voice dalam acara pembukaan menjadi salah satu upaya manajemen memberikan warna baru bagi masyarakat Karimun.

"Kami sengaja menghadirkan artis dari luar daerah agar ada perbedaan dan daya tarik tersendiri. Harapannya, minat masyarakat dan wisatawan untuk berkunjung ke Karimun semakin meningkat," katanya.

Simamora optimistis keberadaan PSDH dapat ikut mendukung perkembangan sektor pariwisata dan ekonomi daerah. Semakin banyak masyarakat maupun wisatawan yang datang, kata dia, maka aktivitas ekonomi di sekitar lokasi juga akan ikut bergerak.

"Kami berharap PSDH dapat memberikan kontribusi positif bagi daerah, termasuk melalui peningkatan aktivitas ekonomi dan kontribusi pajak kepada pemerintah daerah," ujarnya.

Manajemen Matangkan Persiapan

Menjelang hari peresmian, manajemen PSDH terus melakukan berbagai pembenahan di lokasi. Persiapan dilakukan hingga satu hari sebelum acara untuk memastikan seluruh fasilitas dan area pengunjung siap digunakan.

Selain pembenahan tempat, pihak manajemen juga berkoordinasi dengan warga dan masyarakat sekitar, khususnya menyangkut aspek keamanan serta pengaturan kendaraan para tamu dan pengunjung.

Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan dan memastikan kegiatan pembukaan berjalan aman, tertib, serta nyaman bagi seluruh pengunjung.

Simamora menambahkan, berdasarkan komunikasi yang telah dilakukan manajemen, sejumlah pengusaha pemula di Karimun juga dijadwalkan hadir dalam acara peresmian PSDH.

"Kami terus berkoordinasi dengan berbagai pihak agar acara ini berjalan lancar. Kami ingin pembukaan PSDH menjadi momentum yang baik sekaligus memperkenalkan tempat ini kepada masyarakat Karimun," pungkasnya. **(Jonri)**

Satres Narkoba Polres Mukomuko Kembali Ungkap Pengedar Narkoba

Mapolres Mukomuko Polda Bengkulu. (Foto/dok)

Mukomuko, Jaya Pos

Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Mukomuko kembali mengungkap dugaan peredaran narkotika jenis ganja di wilayah Kabupaten Mukomuko. Dalam operasi pemberantasan narkoba yang digelar di Kecamatan Ipuh, Rabu (5/8/2026), polisi mengamankan tiga orang terduga pelaku di tiga lokasi berbeda hanya dalam rentang waktu sekitar empat jam.

Operasi tersebut dipimpin langsung oleh Kasat Resnarkoba Polres Mukomuko IPTU M. Setya Yuli M, S.H., bersama 10 personel. Pengungkapan kasus ini bermula dari informasi masyarakat mengenai dugaan aktivitas peredaran ganja di wilayah Kecamatan Ipuh.

IPTU Setya mengatakan informasi dari masyarakat langsung ditindaklanjuti dengan penyelidikan tertutup sebelum tim bergerak melakukan penindakan di lapangan.

"Informasi masyarakat kami tindak lanjuti dengan penyelidikan. Setelah data awal dinilai cukup, tim langsung bergerak ke lokasi untuk melakukan penindakan," ujar IPTU Setya.

Penangkapan pertama dilakukan sekitar pukul 18.20 WIB di belakang Masjid Darussalam, Desa Medan Jaya. Petugas mengamankan seorang pria berinisial AG (19), pelajar/mahasiswa asal Desa Sibak.

Saat dilakukan pemeriksaan awal, petugas menemukan satu paket ganja dari tangan AG. Penggeledahan kemudian dilanjutkan terhadap sepeda motor Honda Sonic nomor polisi BD 5771 TC yang digunakan terduga pelaku.

Dari bawah jok kendaraan tersebut, polisi menemukan enam paket ganja yang dibungkus plastik hitam. Selain narkotika, petugas juga mengamankan satu unit telepon genggam merek Poco X5 5G yang diduga berkaitan dengan aktivitas komunikasi terduga pelaku.

Berdasarkan keterangan AG, polisi kemudian melakukan pengembangan ke Desa Sibak. Sekitar pukul 19.00 WIB, tim mengamankan seorang pria berinisial WS (18), juga berstatus pelajar/mahasiswa dan berdomisili di Desa Sibak.

WS diamankan di pinggir Sungai Sibak. Dari tangan terduga pelaku, petugas menyita satu paket ganja serta satu unit telepon genggam Poco M4 Pro.

Pengungkapan kedua ini semakin menguatkan dugaan adanya peredaran ganja secara eceran di wilayah tersebut.

Setelah melakukan pemeriksaan awal terhadap dua terduga pelaku sebelumnya, petugas kembali memperoleh informasi mengenai dugaan sumber barang. Tim kemudian bergerak menuju Desa Pulai Payung.

Sekitar pukul 20.00 WIB, petugas melakukan penggeledahan di sebuah rumah milik warga. Di kamar seorang pria berinisial FDP (19), petugas menemukan satu paket ganja yang disimpan di dalam kaleng rokok merek Surya.

Selain paket ganja, polisi juga mengamankan delapan lembar kertas papir merek Djanoko, uang tunai Rp100 ribu, dan satu unit telepon genggam Infinix Note 11 warna biru.

Menurut IPTU Setya, barang-barang tersebut kini diamankan sebagai barang bukti untuk kepentingan penyidikan.

Dari rangkaian operasi tersebut, Satresnarkoba Polres Mukomuko mengamankan total sembilan paket ganja yang diduga siap diedarkan.

"Dalam satu hari kami mengamankan tiga orang dengan total sembilan paket ganja yang diduga siap edar. Modus yang digunakan diduga dilakukan secara eceran di lingkungan masyarakat," jelas IPTU Setya.

Ia menambahkan, keberhasilan pengungkapan kasus ini menunjukkan pentingnya peran masyarakat dalam memberikan informasi kepada kepolisian.

Saat ini AG, WS, dan FDP beserta seluruh barang bukti telah diamankan di Mapolres Mukomuko. Ketiganya masih menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik Satresnarkoba.

Polisi menjerat para terduga pelaku dengan Pasal 114 Ayat (1) subsider Pasal 111 Ayat (1) juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Penyidik juga masih melakukan pengembangan untuk mengungkap kemungkinan adanya jaringan peredaran narkoba lain yang terkait dengan ketiga terduga pelaku.

"Kami masih mendalami asal barang, jalur peredarannya, dan kemungkinan keterlibatan pihak lain. Proses penyidikan akan dilakukan secara menyeluruh," tegas IPTU Setya.

Langkah lanjutan yang dilakukan penyidik antara lain pemeriksaan saksi-saksi, tes urine terhadap para terduga pelaku, penyitaan barang bukti, gelar perkara, serta pelengkapan administrasi penyidikan sebelum berkas perkara dilimpahkan ke kejaksaan.

Polres Mukomuko menegaskan komitmennya untuk terus memberantas peredaran narkoba di wilayah hukumnya, khususnya yang menyasar kalangan remaja dan pelajar.

IPTU Setya mengajak masyarakat, terutama orang tua, tokoh masyarakat, dan pihak sekolah, untuk meningkatkan pengawasan terhadap pergaulan anak dan remaja agar terhindar dari penyalahgunaan narkotika.

"Kami tidak akan memberi ruang bagi peredaran narkoba di Kabupaten Mukomuko. Terima kasih kepada masyarakat yang telah memberikan informasi. Peran masyarakat sangat penting dalam upaya pemberantasan narkoba," ujarnya.

Ia menambahkan bahwa kepolisian akan terus melakukan langkah preventif maupun represif untuk menekan peredaran narkotika. **(Jp)**

Wako Hendri Lepas 150 Anggota LLI Ikuti Studi Dakwah ke Kota Solok

Wali Kota Hendri Arnis saat melepas 150 anggota Lembaga Lansia Indonesia (LLI) Kota Padang Panjang. Foto ist)

Padang Panjang, Jaya Pos

Usia lanjut bukan alasan untuk berhenti belajar, bersilaturahmi, maupun berkontribusi bagi masyarakat. Semangat tersebut disampaikan Wali Kota Padang Panjang, Hendri Arnis, saat melepas 150 anggota Lembaga Lansia Indonesia (LLI) Kota Padang Panjang yang mengikuti kegiatan Studi Dakwah ke Masjid Agung Al Muhsinin, Kota Solok, Rabu (12/8/2026).

Dalam sambutannya, Wako Hendri menyampaikan bahwa kegiatan Studi Dakwah bukan sekadar perjalanan untuk memperdalam wawasan keagamaan. Lebih dari itu, kegiatan tersebut menjadi momentum bagi para lanjut usia untuk mempererat silaturahmi, memperkuat keimanan, menyegarkan pikiran, sekaligus menjaga semangat agar tetap aktif di tengah kehidupan bermasyarakat.

"Bagi Pemko, kegiatan ini merupakan bagian dari upaya kita membangun kota yang tidak hanya ramah bagi anak-anak dan generasi muda, tetapi juga ramah bagi seluruh kelompok usia, termasuk para lanjut usia," ujar Hendri.

Menurutnya, para lansia merupakan bagian penting dalam kehidupan sosial masyarakat. Dengan pengalaman, pengetahuan, dan keteladanan yang dimiliki, para lansia dinilai masih mampu memberikan kontribusi positif bagi keluarga maupun lingkungan sekitarnya.

Karena itu, Hendri berharap para lansia tidak hanya mendapatkan perhatian dalam aspek kesehatan, tetapi juga diberikan ruang yang luas untuk terus berkegiatan, berkarya, bersosialisasi, serta mengambil peran sesuai dengan kemampuan masing-masing.

Ia juga mengajak seluruh peserta untuk senantiasa menjaga kesehatan dan mempertahankan pola hidup aktif agar dapat menjalani masa lanjut usia dengan penuh semangat, mandiri, dan bahagia.

"Semangat Bapak dan Ibu untuk tetap aktif dan sehat dapat menjadi contoh bagi anak-anak dan cucu-cucu kita bahwa bertambahnya usia bukan berarti bertambahnya alasan untuk berhenti berbuat baik," tuturnya.

Hendri menambahkan, kegiatan positif seperti Studi Dakwah diharapkan dapat terus dikembangkan oleh LLI Kota Padang Panjang. Selain memperkaya pemahaman keagamaan, kegiatan semacam ini juga dapat menjadi wadah memperluas persaudaraan, memperkuat kebersamaan, serta menjaga hubungan sosial antarsesama lansia.

Pemko Padang Panjang, lanjutnya, akan terus memberikan dukungan terhadap berbagai kegiatan yang mendorong para lansia untuk hidup sehat, aktif, mandiri, produktif, dan tetap memiliki peran di tengah masyarakat.

"Kita ingin para lansia tetap menjadi bagian penting dalam pembangunan dan kehidupan sosial Kota Padang Panjang. Usia boleh bertambah, tetapi semangat untuk belajar, bersilaturahmi dan berbuat baik harus tetap menyala," pungkasnya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Staf Ahli Faizah, para asisten, Kepala Dinas Sosial PPKBPPPA, Kepala Dinas Kesehatan, serta sejumlah pejabat terkait lainnya. **(Zak)**

Polres Way Kanan Gelar Binrohtal, Personel Diingatkan Jabatan Bukan Amanah yang Abadi

Way Kanan, Jaya Pos

Polres Way Kanan menggelar Bimbingan Rohani dan Mental (Binrohtal) untuk memperkuat keimanan sekaligus membentuk karakter personel yang berakhlak mulia.

Kegiatan rutin tersebut berlangsung khidmat di Masjid Darul Fatah Polres Way Kanan, Kamis (13/8/2026). Kegiatan dihadiri Kapolres Way Kanan AKBP Ramadhona, S.H., S.I.K., bersama jajaran Pejabat Utama (PJU), perwira, bintara, serta Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Polres Way Kanan.

Polres Way Kanan Gelar Binrohtal di Masjid Darul Fatah. (Foto: Ist)

Rangkaian Binrohtal diisi dengan pembacaan Surat Yasin, doa bersama, dan tausiyah keagamaan yang disampaikan Ustaz Mustofa.

Dalam tausiyah tersebut, personel diingatkan agar senantiasa menyadari bahwa waktu terus berjalan dan jabatan yang diemban tidak bersifat kekal.

Kapolres Way Kanan AKBP Ramadhona mengatakan, setiap personel harus mampu memanfaatkan waktu dan amanah yang diberikan Tuhan dengan sebaik-baiknya, terutama untuk memberikan manfaat kepada masyarakat. "Tanpa terasa waktu akan terus berjalan. Jika kita tidak mawas diri dan waspada, kita akan terlena oleh waktu. Pangkat dan jabatan yang kita emban saat ini bukanlah sesuatu yang abadi," ujar Ramadhona.

Menurutnya, setiap jabatan pada akhirnya akan ditinggalkan. Setelah tidak lagi menjabat, seseorang akan kembali menjadi bagian dari masyarakat dan pada akhirnya kembali kepada Tuhan Yang Mahakuasa.

Karena itu, ia mengajak seluruh personel Polres Way Kanan menggunakan waktu yang masih dimiliki untuk menjalankan tugas secara maksimal serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

"Mari kita manfaatkan waktu yang diberikan Tuhan kepada kita ini dengan sebaik-baiknya," pungkasnya.

(Suhaili)

Wali Kota Binjai Tegaskan Komitmen Dukung Program Strategis Nasional dalam Rakor Kemendagri

Binjai, Jaya Pos

Wali Kota Binjai Drs. H. Amir Hamzah, MAP, menghadiri Rapat Koordinasi Kepala Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Regional Sumatera Utara yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Ruang Balairungsari Lantai 3 BP Batam, Kota Batam, Rabu (12/8/2026).

Rakor tersebut menjadi forum strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan jajaran Forkopimda dalam menyelaraskan kebijakan pembangunan serta menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).

Kegiatan juga dirangkai dengan Penganugerahan Pemerintah Daerah Berprestasi Batch II Regional Sumatera Utara. Acara dibuka secara resmi oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan dihadiri para gubernur, bupati, wali Kota, serta jajaran Forkopimda dari berbagai daerah di wilayah Sumatera.

Dalam forum tersebut, pemerintah daerah didorong untuk memperkuat koordinasi lintas sektor guna mendukung percepatan pelaksanaan program strategis nasional di daerah.

Wali Kota Binjai bersama kepala daerah se-Sumatera di Kota Batam menghadiri Rakor dengan Mendagri. (foto/ Diskominfo Binjai)

Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dinilai penting untuk memastikan kebijakan pembangunan dapat berjalan efektif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Wali Kota Binjai Amir Hamzah menegaskan, keikutsertaan Pemerintah Kota Binjai dalam rakor tersebut merupakan bentuk komitmen untuk menyelaraskan arah pembangunan daerah dengan kebijakan dan prioritas nasional.

"Pemerintah Kota Binjai memiliki komitmen yang kuat untuk terus mempererat sinergi dengan pemerintah pusat maupun dengan pemerintah daerah di wilayah Sumatera," ujar Amir

Menurutnya, penyelarasan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah merupakan langkah strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, mempercepat pembangunan, sekaligus menciptakan kondisi daerah yang aman dan kondusif.

Amir menambahkan, stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat menjadi salah satu faktor penting dalam menciptakan iklim investasi dan aktivitas ekonomi yang sehat. Karena itu, koordinasi antara pemerintah daerah dan unsur Forkopimda perlu terus diperkuat.

"Dengan sinergi dan koordinasi yang baik, berbagai program pembangunan dapat dilaksanakan secara lebih optimal sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat," katanya.

Melalui keikutsertaan dalam rakor tersebut, Pemko Binjai menyatakan kesiapan untuk terus mendukung kebijakan pemerintah pusat, khususnya program-program strategis nasional yang sejalan dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan di Kota Binjai.

Forum koordinasi tersebut diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi antarpemerintah daerah di wilayah Sumatera, sekaligus menjaga kesinambungan pembangunan dan stabilitas daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

(Fatimah)

Mediasi Pantai Remis Berujung Kesepakatan..... *Halaman 1*

Pantai Remis.

Kesepakatan itu tercapai dalam mediasi yang digelar Camat Pantai Labu Boby Arianto, S.STP., M.AP bersama sejumlah pihak terkait, Rabu (12/8/2026).

Mediasi berlangsung di ruang kerja Camat Pantai Labu sejak pukul 16.00 WIB hingga sekitar pukul 21.00 WIB. Pertemuan tersebut membahas persoalan penimbunan dan pemagaran akses menuju kawasan Pantai Remis.

Sejumlah pihak hadir dalam mediasi, di antaranya pemilik lahan, pengelola Pantai Remis, pemerintah desa, tokoh masyarakat, unsur TNI-Polri, Satpol PP, organisasi masyarakat, serta nelayan.

Sekcam Pantai Labu Muhammad Azizur Rahman mengatakan mediasi tersebut merupakan lanjutan dari sejumlah pertemuan sebelumnya, termasuk mediasi yang digelar pada Mei 2026.

Menurutnya, persoalan utama yang dibahas adalah akses jalan menuju Pantai Remis yang diharapkan tetap dapat digunakan masyarakat, nelayan, dan pelaku UMKM.

Dalam pertemuan tersebut, Parman Ngasip menjelaskan bahwa akses di kawasan tersebut sebelumnya telah diperbolehkan untuk digunakan masyarakat.

Namun, dia menyebut kondisi lahan terus mengalami perubahan akibat faktor alam dan pemanfaatan kawasan.

Sementara itu, Pengelola Pantai Remis Antonius Perangin Angin berharap akses tersebut tetap menjadi jalan utama bagi nelayan, pelaku UMKM, dan masyarakat yang hendak menuju kawasan pantai.

"Kami berharap jalan itu tetap dapat digunakan sebagai akses menuju objek wisata Pantai Remis," katanya.

Tokoh masyarakat sekaligus mantan Kepala Desa Rugemuk, Sofyan Edrian, turut menjelaskan sejarah dan kondisi lahan serta akses menuju pantai.

Dia menyebut sebelumnya pernah terdapat hibah jalan dengan lebar sekitar 2 meter yang digunakan masyarakat sebagai akses menuju laut.

Camat Pantai Labu Boby Arianto mengatakan mediasi tersebut merupakan tindak lanjut kunjungan Wakil Bupati Deli Serdang ke Pantai Remis pada 9 Agustus 2026.

Menurut Boby, persoalan akses jalan tersebut perlu segera diselesaikan melalui komunikasi dan musyawarah antara pemilik lahan dengan pengelola Pantai Remis.

Setelah berlangsung sekitar lima jam, mediasi akhirnya menghasilkan sejumlah kesepakatan.

Salah satu poin utama, Parman Ngasip selaku pemilik lahan bersedia memberikan akses jalan selebar 4 meter dalam bentuk hibah kepada Pemerintah Desa.

Jalan tersebut nantinya digunakan sebagai akses menuju objek wisata Pantai Remis.

Selain itu, administrasi surat tanah milik Parman Ngasip akan diperbarui dan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengelola Pantai Remis juga menyatakan komitmen untuk menjaga lahan milik Parman Ngasip ke depannya.

Kesepakatan tersebut diharapkan dapat memastikan akses masyarakat, nelayan, dan pelaku UMKM menuju Pantai Remis tetap tersedia.

Di sisi lain, hak kepemilikan lahan tetap dihormati dan seluruh proses akan disesuaikan dengan ketentuan hukum yang berlaku.**(Ramdani)**

Jembatan Garuda dan Fasilitas Air Bersih Diresmikan ..... *Halaman 1*

Simalungun, kegiatan dipusatkan di Jembatan Garuda yang berada di Nagori Karang Anyer Huta VI, Kecamatan Gunung Maligas.

Mengusung tema "Negara Hadir untuk Rakyat", peresmian tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah bersama TNI dan Polri dalam memperluas akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar, termasuk jembatan, air bersih, dan irigasi.

Turut hadir Ketua DPRD Simalungun Sugiarto, Dandim 0207/Simalungun Letkol Inf. Agustri Mukhtadi Rangkuti, Kasrem 022/Pantai Timur Letkol Inf. Binsar Junianto Simanjuntak, pimpinan perangkat daerah, jajaran TNI-Polri, Forkopimcam, serta masyarakat.

Dalam kegiatan tersebut, Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak memaparkan perkembangan pembangunan infrastruktur yang dikerjakan di berbagai daerah.

Secara keseluruhan, pembangunan mencakup 6.240 titik, terdiri dari 3.008 titik jembatan serta 3.232 titik fasilitas air bersih dan air untuk mendukung irigasi pertanian.

Pada tahap peresmian kali ini, sebanyak 1.000 titik diluncurkan secara daring, terdiri atas 700 titik fasilitas air bersih dan 300 titik fasilitas air untuk persawahan.

Untuk pembangunan jembatan, sebanyak 2.500 titik telah diselesaikan dalam waktu hampir tujuh bulan. Dari total 3.008 titik jembatan, sebanyak 508 titik masih dalam proses pembangunan, sedangkan 798 titik berada di wilayah pascabencana.

Pemerintah menargetkan pembangunan hingga 5.000 titik jembatan dapat diselesaikan tahun ini. Percepatan pembangunan dinilai memungkinkan karena proses pengerjaan di lapangan terus meningkat.

Air Bersih dan Irigasi Diperluas

Pembangunan fasilitas air bersih juga terus dilakukan, termasuk di wilayah dengan kondisi geografis yang sulit.

Tercatat sebanyak "10.912 titik fasilitas air bersih" telah dibangun. Sebanyak 5.797 titik merupakan capaian lima tahun sebelumnya, sementara sejak Januari hingga Agustus 2026 sekitar 3.000 titik telah diselesaikan.

Salah satu pembangunan berada di Pulau Raas, Sumenep, dengan pengeboran hingga sekitar 90 meter. Di Gunungsitoli, Nias, pengeboran sumur air bersih mencapai kedalaman 180 meter setelah delapan kali perpindahan lokasi. Fasilitas tersebut kini melayani kebutuhan sekitar 231 kepala keluarga.

Selain air bersih, pembangunan juga diarahkan untuk memperkuat ketahanan pangan melalui pengembangan jaringan irigasi.

Sebanyak "83.150 hektare lahan tadah huj" telah mendapatkan dukungan pengairan dan berpotensi dipanen hingga tiga kali dalam setahun. Sementara itu, 445 titik baru masih dibangun untuk mendukung pengairan tambahan sekitar 16.970 hektare lahan pertanian.

Secara keseluruhan, sekitar "100.120 hektare lahan tadah hujan" telah memperoleh dukungan pengairan dan berpotensi menghasilkan hingga 1,5 juta ton gabah per tahun.

Pengembangan jaringan pipanisasi juga dilakukan di sejumlah wilayah. Di antaranya pipa sepanjang 15 kilometer di Pulau Bawean dan jaringan sepanjang 15 kilometer di Samosir yang ditargetkan rampung akhir tahun ini.

Prabowo: TNI-Polri Harus Hadir untuk Rakyat

Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi pengabdian TNI dan Polri dalam membantu masyarakat melalui pembangunan infrastruktur dasar.

"TNI dan Polri adalah tentara dan polisi rakyat, lahir dari rakyat, berjuang bersama rakyat, dan memberi yang terbaik untuk rakyat. Tidak ada cita-cita lain, tidak ada kehendak lain, swelain berbakti untuk rakyat dan negara," tegas Prabowo.

Presiden menekankan, kehadiran negara harus dirasakan seluruh masyarakat, termasuk warga yang tinggal di daerah terpencil dan terluar. Akses terhadap infrastruktur dasar dan kualitas hidup yang layak, kata dia, harus terus diperkuat.

Dalam kegiatan tersebut, Presiden juga berdialog secara daring dengan sejumlah perwakilan masyarakat dari berbagai daerah. Mereka menyampaikan manfaat pembangunan jembatan, fasilitas air bersih, dan irigasi terhadap aktivitas sehari-hari.

Bupati Simalungun: Jembatan Dorong Ekonomi Warga

Bupati Simalungun Anton Achmad Saragih menyambut baik pembangunan Jembatan Garuda di Nagori Karang Anyer Huta VI.

Menurut Anton, jembatan tersebut tidak hanya mempermudah mobilitas masyarakat, tetapi juga membuka peluang untuk meningkatkan aktivitas ekonomi warga.

Ia berharap pembangunan infrastruktur dasar, khususnya jembatan, air bersih, dan irigasi, terus diperluas agar manfaatnya semakin dirasakan masyarakat pedesaan.

Peresmian ditandai dengan pemotongan pita di Jembatan Garuda Nagori Karang Anyer Huta VI.

Pembangunan tersebut diharapkan menjadi bukti kehadiran negara sekaligus mendorong peningkatan akses transportasi, ketersediaan air bersih, dan pertumbuhan ekonomi masyarakat di wilayah pedesaan.

(Rd)

PT SYK Diduga Alih Fungsikan Ratusan Hektare ..... *Halaman 1*

Persoalannya, apabila suatu lahan pertanian yang memiliki fungsi strategis dan berkaitan dengan aset negara dialihkan menjadi perkebunan, maka publik berhak mengetahui siapa yang memberikan izin, dasar hukum pengalihfungsian, status kepemilikan atau penguasaan lahannya, serta apakah seluruh proses tersebut telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dugaan pelanggaran tidak berhenti pada perubahan fungsi lahan. PT SYK juga diduga melakukan perubahan atau kerusakan terhadap tujuh saluran sekunder dan satu saluran kolektor di kawasan tersebut.

Jika dugaan itu benar, persoalannya menjadi lebih serius karena saluran tersebut memiliki fungsi penting dalam sistem tata air dan mendukung aktivitas pertanian masyarakat.

Perubahan fisik saluran tanpa dasar perizinan yang jelas berpotensi mengganggu tata kelola air, terutama jika kawasan tersebut merupakan bagian dari sistem irigasi pertanian yang selama ini menopang produksi pangan.

Karena itu, pemerintah daerah, instansi teknis, maupun aparat penegak hukum dinilai perlu melakukan verifikasi lapangan dan audit menyeluruh, bukan hanya melihat aspek perizinan perkebunan, tetapi juga status lahan, tata ruang, dokumen aset negara, izin penggunaan sumber daya air, serta dampaknya terhadap jaringan irigasi.

Perlu Dibuka Secara Transparan

Dugaan alih fungsi lahan ini menjadi penting untuk ditelusuri karena pemerintah tengah menghadapi tantangan mempertahankan lahan pertanian produktif di tengah ekspansi perkebunan kelapa sawit.

Ketentuan mengenai perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan pada prinsipnya menempatkan lahan pertanian strategis sebagai aset yang harus dilindungi. Karena itu, setiap perubahan peruntukan lahan harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, administratif, maupun sosial.

Publik juga perlu mendapatkan kejelasan apakah lahan seluas sekitar 140 hektare tersebut memang masuk dalam kawasan yang dilindungi untuk kepentingan pertanian, apakah tercatat sebagai BMN, serta apakah terdapat izin resmi untuk mengubah fungsi lahan tersebut menjadi perkebunan kelapa sawit.

Jika ternyata tidak memiliki dasar perizinan yang sah, maka pemerintah tidak boleh membiarkan persoalan tersebut berlarut-larut. Sebaliknya, jika seluruh proses telah sesuai aturan, pihak perusahaan dan pemerintah seharusnya dapat membuka dokumen serta menjelaskan dasar hukumnya kepada masyarakat agar tidak menimbulkan spekulasi.

Untuk memperoleh keseimbangan informasi dan memberikan hak jawab kepada perusahaan, Jaya Pos Perwakilan Kalimantan Tengah telah menyampaikan surat konfirmasi kepada manajemen PT SYK di lokasi.

Surat tersebut bernomor 075/HJP-KT/VII/2026, tertanggal 3 Agustus 2026. Namun hingga berita ini diterbitkan, pihak manajemen PT SYK belum memberikan tanggapan atas sejumlah pertanyaan terkait status lahan, proses alih fungsi, perizinan, serta dugaan perubahan tujuh saluran sekunder dan satu saluran kolektor tersebut.

Sikap perusahaan yang belum memberikan tanggapan tentu menjadi bagian dari pemberitaan ini. JAYA POS tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi PT SYK maupun pihak-pihak terkait untuk menjelaskan persoalan tersebut secara terbuka.

Kini bola berada di tangan pemerintah dan instansi berwenang. Dugaan alih fungsi lahan pertanian menjadi perkebunan sawit tersebut perlu diuji melalui pemeriksaan dokumen dan pengecekan langsung di lapangan.

Sebab, jika benar terjadi pengalihan fungsi lahan pertanian dan perubahan jaringan irigasi tanpa izin, persoalannya bukan sekadar sengketa pemanfaatan lahan, melainkan menyangkut perlindungan pangan, aset negara, tata ruang, sumber daya air, dan kepentingan masyarakat luas.

(Mandau)

Ezechiel N'douassel..... *Halaman 1*

Selain itu, dalam melengkapi daftar sembilan pemain yang telah memegang kontrak, manajemen turut membawa empat nama pemain yang berpengalaman di kancah nasional.

Adapun empat pemain tersebut, Zikri Ferdiansyah, Iman Fathurohman, Ichsan Kurniawan, dan M Fardan. Kehadiran mereka diproyeksikan memperdalam struktur skuad tim kebanggan Tatar Galuh Ciamis.

Pengurus Manajemen PSGC Ciamis, Erwan Darmawan, mengatakan masuknya nama-nama tersebut tidak lepas dari rekomendasi awal kubu Persib untuk diuji kualitasnya dalam proses seleksi. "Sembilan pemain yang sudah resmi kita kontrak ini memang datang berdasarkan rekomendasi Persib untuk melakoni seleksi," katanya, Rabu (12/8).

Meski kerangka utama mulai terbentuk, pergerakan PSGC dipastikan belum selesai. Juru taktik Heri Kiswanto bersama tim pelatih masih terus melakukan penyaringan ketat secara tertutup dari puluhan nama yang mendaftar. Perekrutan dilakukan secara terukur demi mendapatkan komposisi paling pas dengan karakter permainan yang diinginkan. "Penandatanganan kontrak ini murni hasil evaluasi pelatih dan manajemen. Proses seleksi masih berjalan dinamis dan bertahap," pungkasnya. **(Mamay)**

TPS Ilegal di Jakarta Disorot ..... *Halaman 1*

denda. Yang ketiga, PT-nya yang selama ini mendapatkan keuntungan dari horeka-horeka yang ada, kalau dia tidak bisa memperbaiki, tutup," kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Rabu (12/8/2026), dikutip dari Antara.

Selain menindak pihak eksternal, Pramono mengatakan Pemprov DKI juga akan melakukan pembenahan internal agar penanganan persoalan sampah berjalan secara adil dan menyeluruh.

"Dengan segala respect saya, saya juga harus melakukan pembenahan ke dalam. Sehingga harus fair," ujarnya.

Walhi Temukan Lebih dari 10 TPS Ilegal

Nagrak disebut bukan satu-satunya lokasi pembuangan sampah ilegal di Jakarta. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) DKI Jakarta menyebut terdapat lebih dari 10 titik TPS tidak berizin yang telah ditemukan.

"Kami belum punya data lengkap di Jakarta. Tapi dari yang sudah kami temukan, ada lebih dari sekitar 10 titik, salah satunya di Nagrak," kata Direktur Eksekutif Walhi DKI Jakarta Muhammad Aminullah kepada Tirto, Kamis (13/8/2026).

Keberadaan TPS ilegal tidak hanya berkaitan dengan persoalan kebersihan. Aktivitas tersebut juga berpotensi menimbulkan ancaman kesehatan, pencemaran lingkungan hingga kebakaran.

Tumpukan Sampah Bisa Jadi Bom Waktu

Tumpukan sampah dalam jumlah besar mengalami proses pembusukan yang menghasilkan gas metana. Gas tersebut mudah terbakar sehingga berisiko memicu kebakaran apabila tidak dikelola dengan baik.

Risiko semakin besar karena Walhi menemukan praktik pembakaran sampah secara terbuka di sejumlah TPS ilegal. Pembakaran dinilai menjadi cara cepat bagi pengelola untuk mengurangi tumpukan sampah tanpa mengeluarkan biaya pengolahan.

"Ada di beberapa titik TPS liar yang kami temukan, ada praktik pembakaran sampah. Karena cara penyelesaian paling cepat untuk menghilangkan sampah ya dibakar. Itu hal yang cukup sering terjadi," kata Aminullah.

Dampaknya juga dirasakan warga yang tinggal di sekitar lokasi. Bau menyengat dari tumpukan sampah dapat mengganggu aktivitas sehari-hari, termasuk waktu makan dan interaksi keluarga.

Aktivitas olahraga warga pun bisa terganggu akibat buruknya kualitas udara di sekitar TPS ilegal.

Lindi Ancam Tanah dan Air Tanah

Ancaman TPS ilegal juga datang dari lindi atau cairan hasil rembesan sampah. Jika tidak dikelola dengan sistem yang memadai, cairan tersebut dapat meresap ke tanah dan berpotensi mencemari air tanah yang digunakan masyarakat.

"Jangankan TPS yang liar, yang sudah berizin pun masih menimbulkan permasalahan kesehatan dan sosial ke masyarakat. Apalagi kalau liar," kata Aminullah.

Menurut dia, persoalan pencemaran bukan hanya terjadi di TPS ilegal. Tempat pengolahan sampah resmi pun masih menghadapi tantangan lingkungan.

TPST Bantargebang, misalnya, disebut masih menghadapi persoalan lindi. Sebagian lindi dilaporkan mengalir ke Kali Ciketing dan Kali Asem.

Ketua Koalisi Persampahan Nasional (KPNas) Bagong Suyoto menyebut persoalan tersebut sebagai bom waktu. Timbulan sampah di Bantargebang disebut telah mencapai lebih dari 55 juta ton dengan ketinggian gunungan sampah sekitar 40-50 meter. Sementara kapasitas pengolahan disebut baru sekitar 20 persen.

Ada Dugaan Bisnis Sampah Ilegal

Persoalan TPS ilegal dinilai tidak berdiri sendiri. Di belakang aktivitas tersebut diduga terdapat rantai bisnis pembuangan sampah yang membuat praktik itu terus berlangsung.

Bagong menjelaskan, sampah dari hotel, restoran, dan kafe di kawasan premium Jakarta seperti Blok M, Kelapa Gading, dan Pancoran awalnya diserahkan kepada vendor berizin.

Namun, sampah tersebut kemudian diduga disubkontrakkan kepada pengepul. Sebagian sampah selanjutnya dibuang ke TPS ilegal untuk menghindari biaya pembuangan resmi di Bantargebang.

Retribusi pembuangan di Bantargebang disebut sekitar Rp250 ribu per ton. Dengan kapasitas satu truk sekitar 4-6 ton, biaya yang harus dikeluarkan dapat mencapai sekitar Rp1 juta hingga Rp1,5 juta per truk.

"Pengepul tidak mendapat apa-apa, malah buntung. Maka mereka memilih jalur lain," ujar Bagong.

Akibatnya, truk pengangkut sampah diduga beroperasi pada malam hari melalui jalur alternatif menuju lokasi-lokasi pembuangan ilegal.

Nilai perputaran uang dalam jaringan tersebut disebut dapat mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah. Aminullah juga menyebut adanya dugaan keterlibatan kelompok organisasi kemasyarakatan di sejumlah lokasi.

Jika pembuangan dilakukan melalui jalur resmi, retribusi seharusnya masuk ke kas daerah. Namun, praktik ilegal berpotensi menyebabkan pendapatan daerah tidak tertagih sekaligus membuka ruang bagi praktik bisnis di luar pengawasan.

Pemprov DKI Diminta Perkuat Pengawasan

Bagong menilai pengawasan Pemprov DKI Jakarta terhadap pengelolaan sampah masih perlu diperkuat. Ia menyinggung Pergub Nomor 102 Tahun 2021 yang mengatur kewajiban pelaku usaha horeka dalam mengelola sampah secara mandiri.

"Dalam konteks ini, Pemprov DKI Jakarta bersalah dan melanggar peraturan perundangan," tegas Bagong.

Sementara itu, Aminullah menilai praktik penimbunan sampah secara ilegal dapat masuk dalam kategori pelanggaran serius terhadap ketentuan persampahan dan lingkungan hidup.

"Kalau kita mengacu ke undang-undang persampahan, penimbunan sampah terbuka secara ilegal itu dilarang. Ini sudah masuk ke kejahatan lingkungan dan sudah sepatutnya ditindak tegas," ujarnya.

Ia menyebut ketentuan dalam peraturan lingkungan hidup dapat memuat ancaman pidana hingga 10 tahun penjara dan denda hingga Rp10 miliar, tergantung unsur pelanggaran yang terbukti.

Menurut Aminullah, penutupan TPS ilegal saja tidak cukup. Pemerintah harus membongkar jaringan yang berada di belakang aktivitas tersebut agar praktik serupa tidak kembali muncul.

"Beberapa kasus ketika hanya ditutup, dia akan balik lagi. Dibuat lagi, ditutup lagi, dibuat lagi," katanya.

Pengelolaan Sampah Harus Dibenahi

Bagong mendorong pemerintah mengambil langkah jangka panjang. Salah satunya membangun TPS 3R atau Pusat Daur Ulang Sampah (PDUS) di setiap kelurahan.

Selain itu, titik pengolahan sampah berbasis komunitas perlu mendapat legalitas agar tersedia ruang pengelolaan yang resmi dan tidak dimanfaatkan jaringan ilegal.

Langkah ketiga adalah membersihkan praktik korupsi dan kolusi dalam proyek pengelolaan sampah.

"Jika tidak, persoalan sampah tidak akan beres. Mungkin sampai 30–50 tahun lagi," ujar Bagong.

Ia mengingatkan sejumlah tragedi pengelolaan sampah di Indonesia, mulai dari longsor TPA Leuwigajah pada 2005, insiden Bantargebang pada 2006, hingga longsor TPA Sumurbatu pada 2016.

Persoalan TPS ilegal di Jakarta pun kini menjadi pekerjaan rumah serius bagi Pemprov DKI. Ancaman terhadap lingkungan, kesehatan warga, hingga potensi kebocoran pendapatan daerah membuat penanganannya tidak cukup hanya dengan menutup lokasi, tetapi juga perlu membongkar rantai bisnis di baliknya.**(Red)**

Pemko dan Kodam XX/TIB..... *Halaman 1*

hanya diukur dari banyaknya bibit yang ditanam. Hal yang lebih penting adalah memastikan tanaman tersebut dirawat dan mampu tumbuh hingga memberikan manfaat dalam jangka panjang.

Karena itu, Hendri mengajak seluruh unsur pemerintah, TNI, masyarakat, dan pihak terkait untuk bersama-sama menjaga serta merawat tanaman yang telah ditanam.

"Harapan kita, pohon-pohon ini bisa tumbuh dengan baik dan kawasan ini semakin hijau. Yang paling penting, mari kita jaga dan rawat bersama supaya apa yang kita tanam hari ini benar-benar memberikan manfaat ke depannya," katanya.

Menurut Hendri, kolaborasi lintas sektor menjadi modal penting dalam mempercepat pemulihan kawasan terdampak bencana. Sinergi antara pemerintah daerah, TNI, dan masyarakat tidak hanya berdampak terhadap pemulihan lingkungan, tetapi juga dapat memperkuat kesadaran bersama mengenai pentingnya menjaga kawasan yang memiliki potensi rawan bencana.

Sementara itu, Dandim 03/07 Tanah Datar Letkol Arm Hendriyana mengatakan, penanaman pohon merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam memperingati HUT ke-1 Kodam XX/TIB sekaligus wujud kepedulian TNI terhadap kelestarian lingkungan.

"Penanaman pohon ini diharapkan menjadi langkah bersama untuk menjaga lingkungan dan membantu memulihkan kawasan bekas terdampak galodo, sehingga ke depan kawasan tersebut dapat kembali hijau dan lebih nyaman bagi masyarakat," ujarnya.

Ia berharap tanaman bambu dan pohon produktif yang ditanam dapat tumbuh dengan baik serta memberikan manfaat ekologis dan sosial bagi masyarakat sekitar.

Selain membantu mengembalikan tutupan vegetasi, penghijauan juga diharapkan dapat mendukung upaya menjaga kualitas lingkungan di kawasan tersebut. Perawatan secara berkelanjutan menjadi kunci agar kegiatan yang dilakukan tidak berhenti pada seremoni penanaman, tetapi benar-benar menghasilkan perubahan lingkungan dalam jangka panjang.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Wali Kota Padang Panjang Allex Saputra, Ketua Komisi III DPRD Mahdelmi, Kepala Kejaksaan Negeri Adhi Setyo Prabowo, Ketua Pengadilan Negeri, Wakapolres Padang Panjang, Danyon TP 951/PM, Danyon Brimob, para asisten, kepala OPD terkait, camat, serta unsur Forkopimda dan elemen lainnya.

Penanaman bambu dan pohon produktif ini menjadi bagian dari komitmen bersama untuk menata kembali kawasan yang pernah diterjang galodo. Dengan sinergi pemerintah, TNI, dan masyarakat serta dukungan perawatan yang konsisten, kawasan tersebut diharapkan tidak hanya kembali hijau, tetapi juga menjadi ruang lingkungan yang lebih aman, asri, dan bermanfaat bagi masyarakat Padang Panjang. **(Zak)**

Tim Catur PWI Lampung Panaskan Mesin Jelang Porwanas 2027

Bandar Lampung, Jaya Pos

Tim catur Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Lampung mulai memanaskan mesin menghadapi Pekan Olahraga Wartawan Nasional (Porwanas) 2027. Salah satunya melalui turnamen mini catur cepat dengan durasi 10 menit per pertandingan.

Uji tanding tersebut digelar di lantai dua Gedung PWI Lampung, Minggu (9/8/2026). Sejumlah pecatur lokal, di antaranya Alfanza, Lukman Ginting, dan Bustanul, turut ambil bagian sebagai lawan tanding.

Manajer Cabang Olahraga (Cabor) Catur PWI Lampung, Bey Sujarwo, mengatakan uji tanding dengan pecatur dari luar tim menjadi bagian dari persiapan untuk mengukur kemampuan sekaligus membangun mental bertanding atlet.

"Melalui pelatihan ini, kita berharap para atlet semakin terbiasa dengan suasana pertandingan, sehingga saat Porwanas nanti mereka lebih siap secara teknis maupun mental," kata Bey.

Menurutnya, menghadapi lawan dari luar tim penting untuk mengetahui sejauh mana perkembangan kemampuan para atlet. Selain kemampuan teknis, ketenangan dan konsentrasi saat menghadapi tekanan pertandingan juga menjadi perhatian.

Atlet PWI Lampung di bidang Catur. (Foto: Ist)

Program tersebut sejalan dengan strategi PWI Lampung yang mendorong seluruh cabang olahraga melakukan uji tanding secara berkelanjutan. Terlebih, Lampung akan menjadi tuan rumah Porwanas 2027.

Ketua PWI Lampung Wirahadikusumah mengatakan latihan teknis harus dibarengi dengan pertandingan secara rutin. Menurutnya, pengalaman menghadapi lawan dalam situasi pertandingan menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas atlet.

"Ke depannya kita akan menggelar pelatihan-pelatihan serupa dengan lawan tanding lain agar kemampuan atlet semakin bagus. Nanti juga ada Pelatda untuk 14 cabor yang sudah kita susun," ujar Wira.

Wira meminta seluruh penanggung jawab cabor meningkatkan pengawasan dan melakukan evaluasi secara konsisten terhadap hasil setiap uji tanding.

Dengan persiapan yang terukur, PWI Lampung menargetkan tidak hanya sukses sebagai tuan rumah Porwanas 2027, tetapi juga mampu meraih prestasi maksimal, termasuk medali emas di hadapan publik sendiri.**(Suhaili)**

12 Jembatan Perintis Garuda Rampung

Perkuat Konektivitas dan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Mojokerto

Mojokerto, Jaya Pos

Sebanyak 12 Jembatan Perintis Garuda telah rampung dibangun di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Kehadiran infrastruktur tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Pusat memperkuat konektivitas antarwilayah sekaligus membuka akses masyarakat di kawasan yang sebelumnya memiliki keterbatasan sarana penghubung.

Jembatan-jembatan tersebut diharapkan tidak hanya mempermudah mobilitas warga antardusun dan antardesa, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi, memperlancar akses pendidikan, pelayanan publik, serta memperkuat aktivitas sosial masyarakat.

Peresmian Jembatan Perintis Garuda di Kabupaten Mojokerto. Foto: Dok Adi)

Peresmian Jembatan Perintis Garuda di Kabupaten Mojokerto dilakukan secara serentak secara nasional oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, melalui konferensi video dari Kabupaten Lebak, Provinsi Banten.

Dalam agenda tersebut, pemerintah meresmikan pembangunan sebanyak 3.395 Jembatan Garuda dan 3.000 titik sumber air bersih yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia.

Di Kabupaten Mojokerto, prosesi peresmian berlangsung di Jembatan Armco Perintis Garuda, Dusun Sumberbendo, Desa Sumbertebu, Kecamatan Bangsal.

Kegiatan tersebut dihadiri Danrem 082/CPYJ Kolonel Inf Batara, didampingi Kasdim 0815/Mojokerto Mayor Inf Suwadi yang mewakili Dandim 0815/Mojokerto. Hadir pula Bupati Mojokerto Muhammad Albarra, Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto Ayni Zuroh, jajaran Polres Mojokerto, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, Forkopimda, serta sejumlah instansi terkait.

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur dasar merupakan bentuk nyata kehadiran negara untuk memastikan seluruh masyarakat, termasuk mereka yang tinggal jauh dari pusat perkotaan, memperoleh akses dan kualitas hidup yang layak.

"Negara hadir untuk rakyat yang paling terpencil, rakyat yang paling jauh dari pusat-pusat kehidupan yang besar harus menikmati kualitas hidup yang baik," tegas Presiden.

Presiden juga memberikan apresiasi terhadap semangat gotong royong yang ditunjukkan TNI, Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mendukung pembangunan infrastruktur tersebut.

Menurutnya, keberadaan jembatan mampu memangkas jarak dan waktu tempuh masyarakat sekaligus membuka akses yang lebih luas terhadap berbagai aktivitas ekonomi dan sosial.

"Ini kita buktikan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang bersatu, bangsa yang gotong royong, bangsa yang mampu menggali kekuatan kita sendiri untuk bekerja sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan kebaikan rakyat," ujarnya.

Di Kabupaten Mojokerto, 12 Jembatan Perintis Garuda yang telah dibangun terdiri atas satu jembatan Armco, dua jembatan gantung, dan sembilan jembatan beton.

Kehadiran jembatan tersebut diharapkan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, terutama dalam memperlancar mobilitas warga serta menghubungkan wilayah yang sebelumnya menghadapi keterbatasan akses.

Selain mendukung aktivitas sehari-hari, konektivitas yang semakin baik juga diharapkan mampu memperkuat kegiatan ekonomi masyarakat, memperlancar akses pendidikan dan pelayanan kesehatan, serta memudahkan distribusi hasil pertanian dan berbagai produk usaha warga.

Usai mengikuti peresmian secara virtual, jajaran Forkopimda Kabupaten Mojokerto kemudian meninjau langsung Jembatan Armco Perintis Garuda di Desa Sumbertebu.

Dalam rangkaian kegiatan tersebut, juga dilakukan penebaran sekitar 1,5 kuintal bibit ikan lele. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya mendorong pemanfaatan potensi perairan, memperkuat ketahanan pangan, sekaligus membuka peluang pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Dengan rampungnya 12 Jembatan Perintis Garuda tersebut, Pemerintah Kabupaten Mojokerto berharap konektivitas antarwilayah semakin kuat. Infrastruktur itu diharapkan bukan sekadar menjadi penghubung secara fisik, tetapi juga menjadi pintu masuk bagi terbukanya berbagai peluang ekonomi dan sosial guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

(Ad)

Ribuan Penari Meriahkan Festival Gabrugan di Padarincang Serang

Wakil Gubernur Banten Achmad Dimyati Natakusumah saat membuka Festival Gabrugan di lapangan Rancanini, Desa Mangu, Kecamatan Padarincang Kabupaten Sersng, pada Selasa (11/8/2026).(dok hms)

Banten, Jaya Pos

Wakil Gubernur (Wagub) Banten Achmad Dimyati Natakusumah mendorong agar kegiatan Festival Gabrugan yang diselenggarakan oleh Masyarakat Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang masuk pada even tahunan kepariwisataan nasional atau yang dikenal sebagai Karisma Even Nusantara (KEN). Festival ini dinilai sebagai daya tarik wisatawan nasional datang ke Serang.

Hal itu disampaikan Dimyati saat membuka Festival Gabrugan di lapangan Rancanini, Desa Mangu, Kecamatan Padarincang Kabupaten Sersng, pada Selasa (11/8/2026). Turut hadir Bupati Kabupaten Serang Ratu Rachmatuzakiyah dan tokoh masyarakat Embay Mulya Syarif serta tamu undangan lainnya.

Wagub menilai, festival ini sudah memenuhi persyaratan untuk didaftarkan ke Kementerian Pariwisata untuk dijadikan agenda tahunan. Apalagi di dalam festival ada berbagai jenis tarian dan kebudayaan lokal yang ditampilkan oleh masyarakat.

"Kalau kita lihat tadi, seluruh lapisan masyarakat terlibat dalam festival ini, dari mulai anak-anak sampai lansia," katanya.

Oleh karena itu, Dimyati meminta agar perangkat daerah terkait agar dapat segera berkoordinasi dengan Kementerian Pariwisata untuk mengusulkan Festival Gabrugan masuk kepada kalender kepariwisataan. Dengan masuknya Festival Gabrugan ke KEN akan mempunyai dampak positif terhadap peningkatan perekonomian masyarakat, UMKM serta sektor lainnya. Termasuk juga budaya lokal yang akan terus dilestarikan.

"Jika bukan melalui festival seperti ini, anak-anak kita tidak akan mengenal budaya lokalnya. Maka dari itu saya sangat mendukung kegiatan seperti ini dan harus terus dilestarikan setiap tahunnya," jelasnya.

Bagi masyarakat Padarincang, Festival Gabrugan mempunyai makna historis yang cukup dalam. Tidak hanya festival semata tetapi juga bentuk kebersamaan, kekompakan serta pelestarian budaya lokal yang terus dilakukan.

Dalam festival itu, ada sekitar 4.000 penari yang terdiri dari anak-anak pelajar, mahasiswa, petani, pegiat seni serta masyarakat lokal. Dalam satu irama mereka melakukan tarian kolosal Rampak Gabrugan dan Ngagurah.

Harapan Dimyati itu diamini Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah. Bahkan dirinya mendorong kecamatan-kecamatan lain di Kabupaten Serang untuk bisa mereplikasikan Festival Gabrugan sesuai dengan potensi dan budaya di masing-masing tempat.

Ketua Pelaksana Festival Gabrugan Eko Budianto menambahkan, festival ini menjadi simbol semangat gotong royong masyarakat Padarincang yang sampai saat ini masih terus dipegang teguh, salah satu pemersatunya melalui pelestarian kebudayaan lokal ini. Ia mengapresiasi ribuan penari yang terlibat dalam festival ini.

Menurutnya, keberhasilan kegiatan bukan keberhasilan panitia, tetapi keberhasilan seluruh peserta dan masyarakat Padarincang. "Ini bukti kalau kami masyarakat Padarincang masih kompak dan bersatu dalam memegang teguh warisan kebudayaan kami," ujarnya. **(Yan)**

Gelar Budaya Pesona Kadudampit 2026, Wabup Ingatkan Jaga Alam dan Kebersihan Lingkungan

Sukabumi, Jayapos

Wakil Bupati Sukabumi H. Andreas mengapresiasi inisiatif generasi muda dan kekompakan masyarakat Kadudampit dalam menggelar Gelar Budaya Pesona Kadudampit.

Hal itu disampaikan Wabup menghadiri sekaligus membuka acara Gelar Budaya Pesona Kadudampit Tahun 2026 di Lapang Cijagung, Kecamatan Kadudampit, Rabu (12/8/2026).

" Kemeriahan ini harus diimbangi dengan menjaga alam dan kebersihan lingkungan. Stunting salah satunya dipicu oleh lingkungan yang tidak bersih," ujar wabup.

Wakil Bupati Sukabumi H.Andreas.(Foto: Ist)

Wabup mengingatkan persoalan tersebut karena kebersihan lingkungan berpengaruh terhadap tinggii rendahnya angka stunting.

Wabup berpesan kepada pihak kecamatan hingga pemerintah desa untuk aktif memelihara lingkungan sekitar. Menurutnya, nilai keagamaan dan budaya harus tecermin dalam perilaku hidup bersih sehari-hari.

Sebelumnya, Ketua Panitia Gelar Budaya Pesona Kadudampit, Deden,., menyampaikan bahwa kegiatan ini diisi oleh aneka lomba pelajar, perkemahan Pramuka yang diikuti sekitar 1.500 peserta, pementasan seni tradisional, jalan santai, hingga tabligh akbar dan santunan anak yatim.

"Acara ini lebih ke arah edukasi untuk mengajak anak-anak meninggalkan gadget sejenak. Kita hidupkan kembali budaya olahraga dan kebersamaan," terang Deden.

Diketahui Rangkaian acara yang berlangsung selama sepekan sejak 10 Agustus ini memadukan edukasi, olahraga tradisional, pelestarian seni budaya, hingga peringatan Hari Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia dan Hari Jadi Kabupaten Sukabumi.

Beragam seni budaya khas yang ditampilkan antara lain rampak gendang, pencak silat, angklung bujo dari Desa Cikidang, serta pertunjukan teater kolosal Situ Gunung.

(YUD)

Polsek Kuala Ungkap Ladang Ganja, 11 Batang Tanaman Diamankan

Langkat, Jaya Pos

Polsek Kuala mengungkap dugaan penanaman ganja di area perladangan Desa Garubggang, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, Senin (10/8/2026). Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan seorang pria berinisial SH (35) dan 11 Batang tanaman yang diduga ganja.

Pengungkapan berawal dari informasi masyarakat terkait keberadaan tanaman diduga ganja di lokasi tersebut. Menindaklanjuti informasi itu, personel Polsek Kuala melakukan penyelidikan dan pengintaian hingga akhirnya mengamankan SH, warga Desa Garunggang.

Saat pemeriksaan awal, SH mengakui menanam tanaman tersebut di area perladangan. Ia juga mengaku masih menyimpan daun ganja kering dalam sebuah goni plastik di sebuah gubuk.

SH bersama seluruh barang bukti kemudian diamankan ke Polsek Kuala sebelum dilimpahkan ke Satresnarkoba Polres Langkat untuk menjalani proses penyidikan sesuai hukum yang berlaku.

Kapolres Langkat AKBP Hannry PH. Tambunan melalui PS Kasi Humas IPTU M.R. Siregar mengatakan, pihaknya akan menindaklanjuti setiap informasi masyarakat terkait dugaan penyalahgunaan dan peredaran narkotika.

"Setiap informasi akan kami tindaklanjuti sesuai prosedur hukum yang berlaku," ujar IPTU M.R. Siregar.

Ia juga mengajak masyarakat terus berperan aktif memberikan informasi kepada kepolisian sebagai bagian dari upaya pemberantasan narkotika di wilayah hukum Polres Langkat.

(Fatimah)

Ladang ganja yang di ungkap Polsek Kuala dengan 11 Batang tanaman. (foto/ Humas Polres Langkat)

MARI BERSAMA PERANGI NARKOBA

Harian JAYA POS
Perubahan Menuju Kemajuan

JAPOS.CO
Email:japos@yahoo.com
TERVERIFIKASI DEWAN PERS

SENIN: EDISI 854 TAHUN XIX, 18 - 23 AGUSTUS 2026 | www.harianjayapos.com | HARGA: @Rp.18.000,- LUAR JAWA + ONGKOS KIRIM

Letkol Inf Wahidin Sobar Resmi Jabat Dandim 0204/Deli Serdang

Deli Serdang, Jaya Pos

Letkol Inf Wahidin Sobar, S.Sos., M.Sc., resmi menjabat sebagai Komandan Kodim (Dandim) 0204/Deli Serdang menggantikan Letkol Arh Agung Pujiantoro, S.H.

Serah terima jabatan dipimpin Komandan Korem (Danrem) 022/Pantai Timur Kolonel Inf Sandi Kamidianto, S.I.P., M.I.P., di Makodim 0204/DS, Jalan Galang, Desa Pagar Merbau, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Rabu (12/8/2026).

Dalam kesempatan yang sama, Korem 022/PT juga melepas Letkol Arm Reynold Christian Siregar, S.H., yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Seksi Personel (Kasipers) Korem 022/PT.

Danrem 022/PT mengatakan, pergantian jabatan di lingkungan TNI AD merupakan bagian dari dinamika organisasi sekaligus pembinaan personel. Rotasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan efektivitas pelaksanaan tugas. "Pergantian jabatan hendaknya menjadi momentum untuk melanjutkan hal-hal positif yang telah dirintis sekaligus menghadirkan inovasi dan semangat baru dalam pengabdian," ujar Sandi.

Kepada Dandim 0204/DS yang baru, Danrem meminta Letkol Inf Wahidin Sobar segera beradaptasi dengan karakteristik wilayah dan membangun sinergi dengan pemerintah daerah, Polri, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta seluruh elemen masyarakat.

"Laksanakan amanah ini dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi. Ciptakan inovasi yang memberikan manfaat nyata bagi satuan dan masyarakat, serta tingkatkan pembinaan teritorial dan kepekaan terhadap dinamika situasi di wilayah," katanya.

Sementara kepada pejabat lama, Letkol Arh Agung Pujiantoro dan Letkol Arm Reynold Christian Siregar, Danrem menyampaikan apresiasi atas loyalitas, dedikasi, dan kontribusi selama menjalankan tugas di jajaran Korem 022/PT.

"Atas nama pribadi dan keluarga besar Korem 022/PT, saya menyampaikan terima kasih atas pengabdiannya dan memohon maaf apabila terdapat kekhilafan selama bersama-sama bertugas. Selamat mengemban amanah di tempat tugas yang baru," tutur Sandi.

Ia berharap pengalaman selama bertugas di Korem 022/PT menjadi bekal untuk melanjutkan pengabdian dan meraih kesuksesan di tempat tugas berikutnya.

Acara tersebut turut dihadiri Kasrem 022/PT, para Dandim jajaran, para Kasi Kasrem 022/PT, Dan/Kasatdisjan, Ketua dan pengurus Persit KCK Koorcab Rem 022/PT, serta para perwira, bintara, tamtama, dan PNS di lingkungan Korem 022/PT.**(Rd)**

Komandan Korem 022 / Pantai Timur Pimpin langsung Upacara Serah Terima Jabatan. (Foto/Rd)

Polres Binjai Ungkap Kasus Pembuangan Bayi, Curas, Curat dan 27 Kasus Pekat

Binjai, Jaya Pos

Kepolisian Resor (Polres) Binjai mengungkap sejumlah kasus tindak pidana yang terjadi di wilayah hukumnya. Pengungkapan tersebut meliputi kasus pembuangan bayi, pencurian dengan kekerasan (Curas), pencurian dengan pemberatan (Curat), serta hasil operasi penyakit masyarakat (pekat).

Pengungkapan kasus tersebut disampaikan Kapolres Binjai AKBP R. Bimo Moernanda dalam konferensi pers yang digelar di ruang Aula Anindya

►► Halaman 11

Kapolres Binjai paparkan pengungkapan kasus tindak kejahatan dalam konferensi pers, Senin (10/8/2026). (foto/Humas Polres Binjai)

Wakil Bupati Deli Serdang Tinjau Jalan Penghubung Rumah Liang-Barus Jahe

Deli Serdang, Jaya Pos

Wakil Bupati Deli Serdang Lom Lom Suwondo SS meninjau kondisi jalan penghubung Rumah Liang, Kecamatan STM Hulu, Kabupaten Deli Serdang, dengan Barus Jahe, Kabupaten Karo, Rabu (12/8/2026).

Peninjauan dilakukan di Desa Liang Pematang, Kecamatan STM Hulu, untuk melihat langsung kondisi ruas jalan yang menjadi salah satu akses masyara

►► Halaman 11

Wakil Bupati Deli Serdang Lom Lom Suwondo SS meninjau kondisi jalan penghubung Rumah Liang, Kecamatan STM Hulu, Kabupaten Deli Serdang, dengan Barus Jahe, Kabupaten Karo, Rabu (12/8/2026).(Dok hms)

Kepemimpinan SDN 105329 Wonosari Disorot, Dinas Pendidikan Deli Serdang Diminta Turun Tangan

Deli Serdang, Jaya Pos

Pengelolaan dan kondisi SDN 105329 Wonosari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, kembali menjadi sorotan. Sejumlah pengaduan terkait kepemimpinan kepala sekolah hingga kondisi sarana dan prasarana pendidikan disebut perlu mendapat perhatian serius dari Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang.

Sebelumnya, sejumlah warga sekolah dan masyarakat menyampaikan berbagai keluhan yang menyinggung dugaan sikap arogan, penggunaan bahasa yang dinilai kasar, dugaan tindakan kekerasan terhadap guru, persoalan administrasi, serta perlakuan yang disebut belum mencerminkan keberagaman di lingkungan sekolah.

Untuk memperoleh informasi yang berimbang, awak media mendatangi SDN 105329 Wonosari pada Kamis (13/8/2026) guna meminta klarifikasi langsung kepada Kepala Sekolah YN.

Menurut informasi yang diterima awak media, seorang guru yang sedang piket telah menyampaikan keberadaan wartawan kepada kepala sekolah sebanyak dua kali. Namun, kepala sekolah disebut belum bersedia menemui wartawan dengan alasan sedang sibuk dan memiliki banyak pekerjaan.

Awak media kemudian memilih menunggu untuk memberikan kesempatan kepada pihak sekolah menyampaikan penjelasan. Namun hingga wartawan meninggalkan lokasi, pertemuan dengan kepala sekolah belum terlaksana.

Selain meminta klarifikasi mengenai sejumlah pengaduan, awak media juga melihat langsung kondisi lingkungan SDN 105329 Wonosari.

Dari pantauan di lokasi, terdapat sejumlah bagian bangunan sekolah yang tampak membutuhkan perhatian dan perawatan. Beberapa bagian asbes terlihat berlubang, bahkan ada yang telah terlepas. Pada sejumlah ruang belajar, bagian plafon atau asbes juga tampak tidak terpasang secara optimal.

Salah satu pintu ruang kelas terlihat mengalami kerusakan de-

►► Halaman 11

Kondisi saat ini SDN 105329 Wonosari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang. (Foto/Hl)

Dua Pebalap BMX Muda Ciamis Ukir Prestasi di Ajang Asian BMX Championships 2026

Ciamis, Jaya Pos

Dua atlet sepeda BMX asal Kabupaten Ciamis berhasil mengukir prestasi gemilang di tingkat internasional dengan membawa pulang dua medali perak pada ajang Asian BMX Championship 2026 (sekaligus Malaysia BMX International Race 2026) yang diselenggarakan di National BMX Arena Nilai, Kompleks Velodrome Nasional Malaysia pada 8–9 Agustus 2026.

Kedua atlet muda berbakat asal Tatar Galuh tersebut adalah Adeeva Ozil Afsheen Myesha Andriana (Neng Ozil). Atlet cilik berusia 11 tahun asal Kelurahan Sindangrasa ini sukses meraih Medali Perak pada kategori Challenge Girls usia 11–12 tahun. Di babak final, siswi SDN 7 Ciamis ini tampil luar biasa dan hanya terpaut selisih waktu 0,82 detik dari pembalap asal Jepang yang keluar sebagai juara dunia.

Keyla Oktaviani adalah atlet andalan Ciamis lainnya yang juga berhasil menorehkan prestasi membanggakan dengan menyumbang Medali Perak pada nomor Challenge Girls usia 13–14 tahun setelah bersaing ketat dengan para pembalap terbaik se-Asia.

Apresiasi tinggi datang dari Keluarga Besar Disbudpora Kabupaten Ciamis atas perjuangan keras kedua atlet tersebut yang tidak hanya mengharumkan nama Kabupaten Ciamis dan Jawa Barat, tetapi juga membawa nama baik Indonesia di kancah internasional.

Sementara itu berdasarkan informasi dari ibunda Adeeva Ozil Afsheen Myesha Andriana, Ani Supiani yang akarab dipanggil Mak Idoel. Anaknya yang akrab disapa Ozil itu berhasil meraih dua medali perak dalam dua ajang BMX yang digelar di Malaysia pada 8–9 Agustus 2026. Dua podium tersebut diraih Ozil secara beruntun. "Ia terlebih dahulu finis sebagai runner-up pada ajang Asian BMX Championship 2026, Sabtu, 8 Agustus 2026, sebelum kembali menempati posisi kedua dalam Malaysia International BMX Race sehari kemudian. Pada balapan Asian

►► Halaman 11

Keyla Oktaviani dan Adeeva Ozil Afsheen Myesha Andriana, sukses mengharumkan nama Indonesia di panggung olahraga internasional. (Foto:Mamay)

Polemik Tanah Harim Laut di Pangandaran Terus Bergulir

Bupati Pangandaran, Citra Pitriyami saat berbicara soal tanah harim laut yang bermasalah. (Foto:Mamay)

Pangandaran, Jaya Pos

Polemik tanah harim laut di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat ternyata tidak hanya terjadi di kawasan Pantai Madasari, Kecamatan Cimerak. Bupati Pangandaran Citra Pitriyami mengungkapkan terdapat sejumlah lokasi lain yang menghadapi persoalan serupa, termasuk terkait penerbitan sertifikat hak milik (SHM).

Citra mengatakan, persoalan tersebut menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Pangandaran. Pihaknya bahkan telah memanggil Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk meminta penjelasan terkait legalitas sertifikat yang berada di kawasan tanah harim laut.

Menurutnya, berdasarkan hasil pertemuan dengan BPN, sertifikat yang dipermasalahkan di kawasan Pantai Madasari diketahui telah diterbitkan sekitar tahun 1997. Sementara itu, aturan yang menjadi acuan mengenai kawasan sempadan pantai atau tanah harim laut baru diatur melalui Peraturan Presiden (Perpres) yang terbit pada 2016. "Dari penjelasan BPN, Perpres itu keluar tahun 2016, sedangkan sertifikat tersebut terbit sekitar tahun 1997," kata Citra di Pendopo Bupati, Senin (10/8).

Meski demikian, Citra menegaskan persoalan tanah harim laut di Pangandaran tidak hanya berada di Pantai Madasari. Menurutnya, terdapat sejumlah lokasi lain yang memiliki persoalan serupa sehingga penanganannya perlu dilakukan secara menyeluruh. "Permasalahan tanah harim laut di Pangandaran cukup banyak. Jadi kalau diperiksa, bukan hanya satu lokasi seperti di Madasari saja. Kami akan berdisk-

►►Halaman 11

Tim Verifikasi STBM Kunjungi Mario Pulana, Bidik Jadi Kelurahan STBM Pertama di Kabupaten Maros

Lurah Mario Pulana, Bakti Ben Setiawan, S.STP., MM, bersama Tim Verifikator STBM Provinsi Sulawesi Selatan dan jajaran terkait saat pelaksanaan verifikasi STBM di Kelura. (Foto/Bakti)

Maros, Jaya Pos

Kelurahan Mario Pulana, Kecamatan Camba, Kabupaten Maros, mendapat kunjungan Tim Verifikasi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Provinsi Sulawesi Selatan 6 Agustus lalu dalam rangka menilai penerapan lima pilar STBM sekaligus memastikan komitmen masyarakat dalam mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan, 10/8/2026.

Kegiatan verifikasi tersebut disambut Pemerintah Kelurahan Mario Pulana bersama Puskesmas Camba, jajaran tenaga kesehatan, kader kesehatan, serta masyarakat. Tim verifikator turun langsung melihat penerapan program sanitasi yang telah berjalan di tengah masyarakat.

Lurah Mario Pulana, Bakti Ben Setiawan, S.STP., MM, mengatakan verifikasi STBM menjadi momentum penting untuk mengukur sejauh mana penerapan lima pilar STBM telah dilaksanakan secara konsisten oleh masyarakat. “Keberhasilan STBM tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan dan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat,” ujarnya.

Dalam proses verifikasi, tim melakukan penilaian terhadap lima pilar STBM, yakni stop buang air besar sembarangan (BABS), cuci tangan pakai sabun, pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga, pengelolaan sampah rumah tangga, serta pengelolaan limbah cair rumah tangga.

Tim juga melihat sejumlah inovasi yang dikembangkan Kelurahan Mario Pulana bersama Puskesmas Camba. Salah satunya pemanfaatan Ban bekas sebagai bagian dari pengelolaan limbah cair rumah tangga.

Selain inovasi tersebut, Pemerintah Kelurahan Mario Pulana juga menghadirkan inovasi berbasis potensi lokal dengan memanfaatkan pohon aren sebagai bagian dari upaya pengelolaan sanitasi dan lingkungan.

Bakti dalam tahapan verifikasi berjalan lancar sehingga Kelurahan Mario Pulana dapat memenuhi seluruh indikator dan ditetapkan sebagai Kelurahan STBM pertama di Kabupaten Maros.

Menurut Bakti, semangat untuk menjadi yang pertama bukan merupakan hal baru bagi Kelurahan Mario Pulana. Sebelumnya, Mario Pulana telah mencatat sejumlah capaian, di antaranya menjadi kelurahan pertama di Kabupaten Maros yang melunasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), merampungkan proyek Dana Kelurahan, serta menekan angka kelahiran melalui program Petani Ber-KB.

Dalam rangkaian kegiatan tersebut turut hadir Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Maros, Kabid Kesmas Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, Kabid Kesmas Dinas Kesehatan Kabupaten Maros, serta Tim Verifikator STBM Provinsi Sulawesi Selatan.

Kelurahan Mario Pulana, Kecamatan Camba, kemudian tercatat sebagai yang pertama dan satu-satunya di Kabupaten Maros yang terverifikasi dalam kategori Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). Capaian tersebut menjadi hasil dari sinergi antara pemerintah kelurahan, Puskesmas Camba, tenaga kesehatan, kader, dan masyarakat yang secara bersama-sama menjalankan berbagai program sanitasi dan kesehatan lingkungan.

Pemerintah Kelurahan Mario Pulana berharap capaian tersebut tidak berhenti disini, tetapi dapat dipertahankan dan dikembangkan menjadi budaya hidup bersih dan sehat masyarakat.

Dengan penerapan lima pilar STBM dan berbagai inovasi berbasis lingkungan, Mario Pulana diharapkan dapat menjadi contoh bagi desa dan kelurahan lainnya di Kabupaten Maros dalam mewujudkan lingkungan yang sehat, bersih, nyaman, dan berkelanjutan,(Hakim).

Dituntut Tiga Miliar Kelompok Petani Tanjung Sakti Mukomuko Bawa Hasil Tani ke Pengadilan Negeri Mukomuko

Kelompok Petani bawa hasil tani ke PN Mukomuko. (Foto/Jp)

Mukomuko, Jaya Pos

Tiga petani yang merupakan bagian dari Kelompok Petani Tanjung Sakti, Desa Sibak, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, yakni Harapandi, Rasuli dan Ibnu Amin, mendatangi Pengadilan Negeri (PN) Mukomuko, Kamis, 13 Agustus 2026.

Kedatangan mereka dilakukan untuk menunjukkan itikad baik dalam memenuhi kewajiban pembayaran atas putusan perkara senilai Rp3 miliar yang berkaitan dengan konflik lahan antara Kelompok Petani Tanjung Sakti dengan PT Daria Dharma Pratama (DDP).

Dalam kesempatan tersebut, para petani bertemu dengan Humas PN Mukomuko dan menyampaikan maksud kedatangan mereka untuk membayar kewajiban sebagaimana putusan pengadilan.

Namun, pembayaran tersebut tidak dapat diterima oleh pihak PN Mukomuko.

Para petani mendapat penjelasan bahwa PN Mukomuko tidak memiliki kewenangan untuk menerima pembayaran tersebut.

Para petani datang tidak hanya membawa uang, tetapi juga membawa berbagai hasil bumi yang menjadi sumber kehidupan mereka. Di antaranya ubi, kelapa, pisang dan sejumlah hasil pertanian lainnya.

Harapandi mengatakan, hasil bumi tersebut sengaja dibawa sebagai bentuk kemampuan nyata para petani dalam memenuhi kewajiban yang dibebankan kepada mereka.

“Kami datang dengan itikad baik untuk membayar. Kami membawa uang dan juga hasil bumi seperti ubi, kelapa, pisang serta hasil pertanian lainnya. Itu merupakan hasil dari pekerjaan kami sebagai petani,” kata Harapandi.

Menurutnya, membawa hasil bumi bukan sekadar simbolis. Bagi petani Tanjung Sakti, hasil pertanian merupakan bagian dari sumber penghidupan sehari-hari.

“Kalau kami punya uang Rp3 miliar, tentu kami bayar dengan uang. Tetapi kami petani. Yang kami punya adalah hasil dari pertanian. Karena itu kami membawa apa yang kami miliki,” ujarnya.

Setelah mendapat penjelasan bahwa pihak PN Mukomuko tidak memiliki kewenangan untuk menerima pembayaran tersebut, para petani kemudian memutuskan untuk meninggalkan hasil bumi yang telah mereka bawa di PN Mukomuko.

Ubi, kelapa, pisang dan hasil pertanian lainnya tersebut akhirnya ditinggalkan di lingkungan PN Mukomuko sebagai bentuk simbolis dari kesungguhan dan itikad para petani untuk memenuhi kewajiban.

“Kami sudah membawa hasil bumi ini dari kampung. Karena pembayaran tidak dapat diterima, akhirnya kami putuskan hasil bumi ini ditinggalkan di PN Mukomuko. Ini bentuk kesungguhan kami bahwa kami datang untuk membayar, bukan untuk menghindari kewajiban,” tegas Harapandi.

Ia mengatakan, keputusan tersebut juga menjadi gambaran mengenai kondisi masyarakat petani yang berhadapan dengan kewajiban pembayaran dalam jumlah besar.

Bagi para petani, nilai Rp3 miliar bukanlah angka yang ringan. Sumber penghasilan mereka berasal dari lahan dan hasil pertanian yang dikelola sehari-hari.

“Yang kami bawa ini mungkin nilainya tidak sebanding dengan Rp3 miliar. Tetapi ini adalah hasil keringat petani. Ini yang kami punya dan ini yang bisa kami bawa untuk menunjukkan bahwa kami memiliki itikad baik,” ungkapnya.

Harapandi berharap terdapat kejelasan mengenai mekanisme pembayaran yang dapat dilakukan sehingga para petani tidak dianggap mengabaikan putusan pengadilan.

“Kami ingin memenuhi kewajiban sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Kalau PN Mukomuko tidak mempunyai kewenangan menerima pembayaran, kami tentu akan mengikuti prosedur yang benar. Yang penting jangan sampai kedatangan kami hari ini dianggap sebagai upaya menghindari putusan,” katanya.

Perkara yang melibatkan Harapandi, Rasuli dan Ibnu Amin merupakan bagian dari konflik agraria yang lebih luas antara Kelompok Petani Tanjung Sakti dengan PT Daria Dharma Pratama (DDP).

Perkara tersebut bermula dari gugatan perdata yang kemudian diputus PN Mukomuko pada 5 Maret 2024 melalui Putusan Nomor 6/PDT.G/2023/PN MKM. Dalam putusan tersebut, ketiga petani dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum.

Para petani kemudian menempuh upaya hukum hingga tingkat Mahkamah Agung (MA). Bagi Kelompok Petani Tanjung Sakti, perkara tersebut tidak dapat dipisahkan dari konflik lahan yang telah berlangsung dan menyangkut ruang hidup serta sumber penghidupan masyarakat petani.

Harapandi menegaskan bahwa pembayaran yang mereka upayakan hari ini tidak dapat dilepaskan dari rangkaian panjang konflik tersebut.

“Kami menghormati proses hukum dan putusan pengadilan. Tetapi kami juga ingin agar konflik antara kelompok petani dan perusahaan ini dilihat secara utuh. Yang kami perjuangkan bukan hanya persoalan uang, tetapi juga tanah dan sumber kehidupan petani,” jelasnya.

Ia berharap peristiwa di PN Mukomuko tersebut dapat menjadi perhatian publik. Terlebih, para petani telah menunjukkan secara langsung bahwa mereka datang dengan itikad untuk memenuhi kewajiban, bahkan membawa hasil bumi yang menjadi sumber kehidupan mereka.

Bagi Kelompok Petani Tanjung Sakti, ubi, kelapa, pisang dan hasil pertanian lainnya yang ditinggalkan di PN Mukomuko hari ini menjadi simbol bahwa petani datang dengan apa yang mereka miliki.

“Kami datang membawa hasil bumi dari tanah yang selama ini menjadi sumber kehidupan kami. Hari ini hasil bumi itu kami tinggalkan di PN Mukomuko. Mudah-mudahan ini menjadi pesan bahwa petani tidak sedang lari dari kewajiban, tetapi sedang berusaha memenuhi kewajiban dengan kemampuan yang kami miliki,” pungkas Harapandi.**(Jp)**

Dugaan Intimidasi Wartawan di Newton Cafe Karimun Berakhir Damai, Bupati Jadi Mediator

Karimun, Jaya Pos

Persoalan dugaan intimidasi dan ancaman kekerasan terhadap seorang wartawan yang terjadi di Newton Cafe, Tanjung Balai Karimun, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau, akhirnya diselesaikan melalui perdamaian dan pendekatan restorative justice.

Proses perdamaian tersebut berlangsung di Rumah Dinas Bupati Karimun, Jumat (14/8/2026), mulai sekitar pukul 09.30 WIB. Kesepakatan perdamaian dipimpin langsung Bupati Karimun, Ing. H. Iskandarsyah, dan disaksikan kedua belah pihak serta sejumlah tokoh pemuda Karimun.

Kapolres Karimun AKBP Yunita Stevani menyampaikan apresiasi kepada kedua pihak yang telah memilih menyelesaikan persoalan secara damai dan kekeluargaan.

“Terima kasih kepada kedua belah pihak yang telah bersedia menempuh penyelesaian masalah ini melalui perdamaian dan kekeluargaan,” ujar Yunita.

Menurutnya, perdamaian tersebut dapat terwujud karena adanya niat baik dari seluruh pihak untuk duduk bersama dan mencari penyelesaian terbaik.

Kapolres juga mengapresiasi Bupati dan Wakil Bupati Karimun yang turut berperan dalam proses penyelesaian persoalan tersebut.

“Kita sangat mengapresiasi Bupati dan Wakil Bupati Karimun yang ikut membantu menyelesaikan persoalan ini. Kesepakatan bersama ini tentu lahir dari niat baik semua pihak untuk menyelesaikan persoalan secara kekeluargaan sebagai sesama masyarakat Karimun,” katanya.

Sementara itu, Bupati Karimun Ing. H. Iskandarsyah mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung proses perdamaian hingga berjalan dengan aman, harmonis, dan penuh persaudaraan.

Menurut Iskandarsyah, kondisi keamanan dan iklim daerah menjadi salah satu faktor penting dalam menarik minat investor untuk menanamkan modal di Karimun.

Karena itu, ia mengajak seluruh elemen masyarakat bersama-sama menjaga kondusivitas daerah agar Karimun semakin maju dan mampu membuka lebih banyak lapangan pekerjaan.

“Marilah kita bersama-sama menjaga kondusivitas Karimun ke depan, sehingga daerah ini terus berkembang, semakin maju, dan mampu menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat,” ujarnya.

Sebagai bentuk kesepakatan, kedua belah pihak menandatangani perjanjian perdamaian secara tertulis yang turut disaksikan sejumlah saksi.

Dalam kesepakatan tersebut, kedua pihak menyatakan telah berdamai dan berkomitmen menjaga hubungan baik serta tidak mengulangi persoalan serupa di kemudian hari.

Suasana perdamaian berlangsung penuh kekeluargaan. Kedua pihak terlihat saling berjabat tangan dan berangkulan sebelum melakukan penandatanganan kesepakatan.

Kegiatan kemudian ditutup dengan foto bersama dan ramah tamah seluruh pihak yang hadir.

Dengan tercapainya perdamaian tersebut, persoalan yang sebelumnya menimbulkan perhatian di tengah masyarakat Karimun diharapkan tidak kembali terulang dan hubungan kedua belah pihak dapat berjalan baik ke depannya.

(Jonri)

Setelah sepakat berdamai, akhirnya foto bersama. (Foto/Jonri)

Penyelundupan Emas Rp63 Miliar Terbongkar, 7 Penumpang Diamankan

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.(dok hms)

Tangerang, Jaya Pos

Bea Cukai Soekarno-Hatta kembali menggagalkan upaya penyelundupan emas dalam jumlah besar. Bersama Aviation Security (Avsec) Bandara Internasional Soekarno-Hatta, petugas mengungkap dua kasus penyelundupan emas dalam waktu kurang dari 24 jam.

Dari penindakan yang dilakukan pada 10 dan 11 Agustus 2026, petugas mengamankan total 23,793 kilogram emas dengan perkiraan nilai pasar mencapai Rp63 miliar.

Dua kasus tersebut menggunakan modus berbeda. Emas ditemukan disembunyikan di sejumlah bagian tubuh, pakaian dalam yang telah dimodifikasi, tas handcarry, hingga dibawa melalui jalur khusus karyawan bandara dengan melibatkan staf ground handling.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan Bea Cukai terus meningkatkan kemampuan pengawasan untuk menghadapi berbagai modus penyelundupan yang semakin berkembang.

Menurutnya, teknologi pemeriksaan, analisis risiko, analisis data penumpang, pengawasan lapangan dan sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan bandara menjadi bagian penting dalam memperkuat pengawasan perbatasan.

Berawal dari Pemeriksaan di Terminal 3

Pengungkapan kasus pertama bermula dari sinergi Avsec dan petugas Bea Cukai yang menemukan dugaan pembawaan emas dalam tas handcarry milik seorang penumpang WNA China di Terminal 3 Keberangkatan.

Saat dilakukan pemeriksaan, petugas menemukan emas berbentuk silinder atau telur di dalam tas handcarry tersebut.

Tidak berhenti di situ, petugas kemudian menemukan penumpang lain berdasarkan anomali hasil pemeriksaan body scanner. Setelah diperiksa lebih lanjut, ditemukan emas berbentuk silinder yang disembunyikan di dalam pakaian dalam yang telah dimodifikasi.

Tim Bea Cukai kemudian melakukan analisis data penumpang melalui Passenger Analysis Unit (PAU). Hasil analisis menemukan dugaan keterkaitan kedua penumpang tersebut dengan penumpang lainnya yang berada dalam dua penerbangan tujuan Hong Kong, yakni CX798 dan GA860.

Sebanyak lima penumpang yang diduga berkaitan kemudian diamankan untuk menjalani pemeriksaan lebih mendalam.

Dari pemeriksaan lanjutan, petugas menemukan emas berbentuk telur dengan modus inserter pada area kemaluan dan dubur. Emas lainnya disembunyikan di dalam celana dalam yang telah dimodifikasi.

Secara keseluruhan, dari penindakan pertama petugas mengamankan tujuh penumpang dan 41 keping emas seberat 17,436 kilogram dengan perkiraan nilai pasar mencapai Rp46 miliar.

Hasil pengujian menggunakan Detektor Mineral XRF menunjukkan seluruh emas tersebut memiliki kadar Au 99,99 persen atau 24 karat.

Berdasarkan hasil gelar perkara, tujuh penumpang tersebut telah memenuhi unsur tindak pidana penyelundupan di bidang ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102A huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Kurang dari 24 jam setelah penindakan pertama, Bea Cukai kembali menggagalkan penyelundupan emas dengan modus berbeda.

Seorang staf ground handling ditemukan membawa emas melalui jalur khusus karyawan atau loading dock. Barang tersebut rencananya diserahkan kepada seorang penumpang yang akan berangkat menuju Dubai menggunakan penerbangan EK357.

Dari pemeriksaan, petugas menemukan tujuh keping emas berbentuk cast bar dengan berat 6,357 kilogram.

Emas tersebut diperkirakan memiliki nilai pasar sekitar Rp17 miliar dan disimpan di dalam tas ransel serta koper kabin tanpa dilengkapi dokumen kepabeanan.

Menkeu menegaskan pengawasan terhadap lalu lintas barang dan penumpang tidak cukup hanya dilakukan melalui pemeriksaan fisik.

"Setiap temuan harus dikembangkan, tidak berhenti pada siapa yang membawa barang, tetapi juga dari mana barang berasal, kepada siapa akan diserahkan, dan siapa saja yang akan terlibat," tegasnya.

Total 23,793 Kilogram Emas Diamankan

Dari dua penindakan tersebut, Bea Cukai Soekarno-Hatta mengamankan 23,793 kilogram emas dengan perkiraan nilai pasar mencapai Rp63 miliar.

Untuk pengembangan perkara dan penelusuran asal emas, Bea Cukai Soekarno-Hatta melakukan sinergi dengan Bareskrim Polri dan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian ESDM.

Pemerintah mengingatkan masyarakat bahwa pembawaan emas ke luar negeri wajib memenuhi ketentuan kepabeanan dan ketentuan ekspor yang berlaku.

Ketentuan barang bawaan penumpang antara lain diatur melalui PMK Nomor 203/PMK.04/2017 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 34 Tahun 2025. Selain itu, sejak 23 Desember 2025 berlaku PMK Nomor 80 Tahun 2025 yang mengatur jenis barang ekspor berupa emas tertentu yang dikenakan Bea Keluar.

Masyarakat yang akan membawa emas ke luar negeri diimbau menyampaikan pemberitahuan kepada petugas Bea Cukai, memastikan kewajiban Bea Keluar, serta memenuhi ketentuan larangan dan pembatasan.

Pemerintah memastikan pengawasan akan terus diperkuat sekaligus memberikan edukasi agar kegiatan ekspor dan pembawaan barang ke luar negeri berlangsung secara legal, transparan, dan sesuai ketentuan.

(Michael J Manurung)

Kejari Jakarta Timur Hormati Putusan Praperadilan Irma Yuliana

Kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Timur dan Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Timur (dok Ist)

Jakarta, Jaya Pos

Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Timur menghormati putusan hakim tunggal Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur yang menyatakan penetapan Irma Yuliana sebagai tersangka dalam kasus dugaan pengadaan mesin jahit tidak sah.

Perkara tersebut berkaitan dengan pengadaan mesin jahit pada Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) Jakarta Timur untuk tahun anggaran 2022, 2023, dan 2024.

Kejari Jakarta Timur menyatakan belum menentukan langkah hukum selanjutnya. Tim penyidik masih mempelajari pertimbangan hakim dalam putusan praperadilan tersebut.

Hal itu disampaikan Kepala Seksi Intelijen Kejari Jakarta Timur, Yogi Sudharsono, S.H., M.H., melalui pesan WhatsApp kepada awak media, Rabu (12/8/2026).

"Terkait dengan putusan tersebut tim penyidik menghormati putusan tersebut, dan selanjutnya akan mempelajari putusan tersebut untuk menentukan langkah selanjutnya," kata Yogi.

Pernyataan tersebut menjadi respons resmi Kejari Jakarta Timur sehari setelah putusan praperadilan dibacakan pada Selasa (11/8/2026).

Dengan adanya putusan tersebut, Kejari Jakarta Timur akan menelaah pertimbangan hakim, khususnya terkait penetapan Irma Yuliana sebagai tersangka serta tindakan upaya paksa yang dilakukan terhadapnya.

Sampai saat ini belum ada penjelasan apakah penyidik akan melakukan pendalaman alat bukti, memperbaiki konstruksi perkara, menempuh langkah hukum tertentu, atau kembali menetapkan Irma Yuliana sebagai tersangka apabila persyaratan alat bukti telah terpenuhi.

Yogi hanya memastikan tim penyidik akan mempelajari putusan sebelum menentukan langkah berikutnya.

Sebelumnya, Juru Bicara 2 PN Jakarta Timur, Hakim Arief Yudiarto, S.H., M.H., menjelaskan alasan hakim tunggal mengabulkan sebagian permohonan praperadilan Irma Yuliana.

Menurut Arief, putusan tersebut bukan berarti hakim menyatakan tidak ada dugaan tindak pidana dalam perkara tersebut.

Persoalannya, alat bukti yang digunakan ketika Irma Yuliana ditetapkan sebagai tersangka pada 18 Mei 2026 dinilai belum memiliki kualitas dan relevansi yang cukup untuk menghubungkannya dengan dugaan tindak pidana.

"Alat-alat bukti yang ada pada waktu ditetapkan tersangka itu belum punya kualitas untuk menunjukkan bahwa ini orangnya," ujar Arief.

Dia menjelaskan, alat bukti yang tersedia dapat menunjukkan adanya dugaan peristiwa pidana. Namun, bukti tersebut dinilai belum cukup kuat untuk menghubungkan peristiwa tersebut dengan Irma Yuliana secara objektif.

Rangkaian proses hukum pada 18 Mei 2026 juga menjadi perhatian hakim.

Berdasarkan dokumen yang menjadi pertimbangan hakim tunggal, pada tanggal tersebut berlangsung sejumlah tahapan, mulai dari penerbitan surat perintah penyidikan, pemeriksaan lanjutan, pemberitahuan dimulainya penyidikan hingga penetapan tersangka.

Arief menyebut rangkaian proses yang berlangsung dalam waktu singkat menjadi salah satu pertimbangan hakim dalam menilai kualitas alat bukti.

"Pelaksanaan penyidikan dilakukan dalam waktu satu hari," katanya.

Pada hari yang sama, Irma Yuliana sebelumnya masih diperiksa dalam kapasitas sebagai saksi.

Kondisi tersebut kemudian menjadi bagian dari penilaian hakim mengenai kecukupan alat bukti untuk mengubah status hukum Irma Yuliana dari saksi menjadi tersangka.

Dugaan kerugian negara juga menjadi bagian yang dipertimbangkan dalam perkara tersebut.

Namun, Arief menegaskan adanya dugaan kerugian negara tidak otomatis membuat seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka.

Menurutnya, tetap diperlukan alat bukti yang berkualitas dan relevan untuk menghubungkan orang tersebut dengan dugaan tindak pidana.

"Kerugian negara juga ada di sini. Mungkin alat bukti itu termasuk kerugian negara. Tapi alat-alat bukti yang ada pada waktu ditetapkan tersangka itu belum punya kualitas untuk menunjukkan orangnya," jelas Arief.

Dengan demikian, persoalan utama dalam praperadilan bukan hanya ada atau tidaknya dugaan kerugian negara, melainkan apakah alat bukti yang dimiliki penyidik sudah cukup untuk menunjuk Irma Yuliana sebagai tersangka.

Putusan praperadilan juga berdampak pada status penahanan Irma Yuliana.

Hakim tunggal menyatakan tindakan penahanan berdasarkan surat perintah penahanan tertanggal 18 Mei 2026 tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Perpanjangan penahanan berdasarkan surat perintah tertanggal 4 Juni 2026 juga dinyatakan tidak sah.

Hal yang sama berlaku terhadap perpanjangan penahanan berdasarkan penetapan Wakil Ketua PN Jakarta Timur tertanggal 9 Juli 2026, termasuk Penetapan Nomor 377 tanggal 9 Juli 2026.

Pengadilan kemudian memerintahkan agar Irma Yuliana segera dibebaskan dari tahanan negara setelah putusan dibacakan.

Arief menegaskan putusan praperadilan tersebut tidak otomatis menghentikan penyidikan perkara pokok.

Menurut dia, yang dinyatakan tidak sah adalah penetapan Irma Yuliana sebagai tersangka berdasarkan kondisi alat bukti pada saat penetapan dilakukan.

Penyidikan perkara pokok tetap dapat berjalan. Penyidik juga masih dimungkinkan menetapkan kembali Irma Yuliana sebagai tersangka jika memperoleh alat bukti tambahan yang memenuhi ketentuan hukum.

"Tidak menutup kemungkinan nanti ditetapkan kembali sebagai tersangka. Penyidikannya tetap jalan," ujar Arief.

Dengan demikian, putusan praperadilan bukan putusan yang menyatakan Irma Yuliana terbukti tidak melakukan tindak pidana.

Putusan tersebut hanya berkaitan dengan sah atau tidaknya penetapan tersangka serta tindakan upaya paksa berdasarkan kondisi hukum ketika penetapan dilakukan.

Kasus ini berkaitan dengan dugaan pengadaan mesin jahit Singer tipe M1115 dan M1255 pada lingkungan Suku Dinas PPKUKM Jakarta Timur untuk tahun anggaran 2022, 2023, dan 2024.

Nama PT Selaras Cipta Sempurna turut dikaitkan dalam proses pengadaan tersebut.

Setelah penetapan Irma Yuliana sebagai tersangka dinyatakan tidak sah, Kejari Jakarta Timur kini harus menentukan langkah penanganan perkara dengan mempertimbangkan isi putusan serta perkembangan alat bukti.

Untuk saat ini, Kejari Jakarta Timur memastikan menghormati putusan hakim dan masih mempelajari pertimbangan putusan sebelum mengambil langkah selanjutnya.

Jika nantinya ditemukan alat bukti tambahan yang memenuhi ketentuan, proses hukum terhadap perkara pokok masih dapat dilanjutkan.

Sebaliknya, apabila terdapat aspek hukum yang perlu diperbaiki sesuai pertimbangan hakim, Kejaksaan harus menyesuaikan penanganannya dengan putusan tersebut.

Publik kini menunggu langkah Kejari Jakarta Timur berikutnya dalam perkara dugaan pengadaan mesin jahit tersebut.

Pemberitaan ini membuka ruang hak jawab dan konfirmasi kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, PN Jakarta Timur, Irma Yuliana, PT Selaras Cipta Sempurna, serta pihak terkait lainnya sebagai bagian dari upaya menjaga keberimbangan dan akurasi jurnalistik.**(Red)**

Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025 Disetujui DPRD, Supian Suri Tekankan Transparansi dan Kolaborasi

Depok, Jaya Pos

Wali Kota Depok Supian Suri mengapresiasi komitmen dan sinergi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok dalam pembahasan hingga persetujuan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

Apresiasi tersebut disampaikan Supian Suri dalam Sidang Paripurna DPRD Kota Depok belum lama ini, dengan agenda persetujuan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025

Menurut Supian Suri,persetujuan raperda tersebut menjadi salah satu tahapan penting dalam siklus pengelolaan keuangan daerah. Lebih dari sekadar memenuhi ketentuan administratif, proses tersebut menunjukkan adanya kolaborasi antara Pemkot Depok dan DPRD dalam menjaga tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

"Persetujuan ini bukan sekadar tahapan administratif, tetapi bagian penting dari siklus pengelolaan keuangan daerah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban kepada masyarakat," ujar Supian Suri

Ia menjelaskan, dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tidak hanya menggambarkan capaian fiskal Pemerintah Kota Depok, tetapi juga menjadi gambaran atas efektivitas berbagai program pembangunan yang telah dilaksanakan sepanjang tahun anggaran 2025.

Karena itu, penyusunan laporan pertanggungjawaban dilakukan dengan mengedepankan prinsip transparansi, akurasi data, kepatuhan terhadap regulasi, serta akuntabilitas. Hal tersebut, kata Supian Suri merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam memastikan setiap pengelolaan anggaran daerah dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Wali Kota Depok Supian Suri hadiri Sidang Paripurna DPRD Kota Depok dengan agenda persetujuan Raperda Pertanggungjawaban.(Foto : Joko Warihnyo)

Setelah mendapat persetujuan DPRD, Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 selanjutnya akan disampaikan kepada Gubernur Jawa Barat untuk menjalani proses evaluasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Evaluasi tersebut meliputi kesesuaian dengan APBD dan perubahan APBD, penjabaran Peraturan Wali Kota, serta laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Di sisi lain, Supian Suri mengingatkan bahwa tantangan pengelolaan anggaran daerah ke depan tidak semakin ringan. Pemerintah daerah harus menghadapi dinamika ekonomi global, dampak perubahan iklim, percepatan transformasi digital, hingga potensi berkurangnya transfer fiskal dari pemerintah pusat.

Kondisi tersebut menuntut pemerintah daerah dan DPRD untuk semakin adaptif dalam menentukan kebijakan serta mengelola anggaran agar tetap memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.

"Oleh karena itu, kita perlu terus memperkuat kolaborasi, inovasi, dan komitmen bersama agar setiap kebijakan dan anggaran benar-benar berdampak langsung bagi masyarakat," katanya.

Supian Suri pun mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk menjaga dan memperkuat semangat kemitraan antara Pemkot Depok dan DPRD. Menurutnya, sinergi yang solid menjadi modal penting agar berbagai agenda pembangunan daerah dapat berjalan lebih optimal.

"Semoga sinergi yang telah terjalin dapat terus diperkuat guna mewujudkan Kota Depok yang maju, inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan sebagai bagian dari kontribusi menuju Indonesia Emas 2045," pungkasnya.

(Joko Warihnyo)

Harian JAYA POS Perubahan Menuju Kemajuan
Terbit Setiap Minggu

Diterbitkan Oleh:
PT. Media Cipta Jaya Selaras
SK MENKUM & HAM RI:
Nomor: AHU-19831.40.10.2014
Hak Merek Hukum & HAM No. IDM000299337
NPWP No: 70.947.655.0-001.000
SIUP No: 07715-05/PM/1.824.271
Nomor Induk Berusaha (NIB): 0220104340564

REDAKSI:
Jl. Komplek Depag Blok G2 No. 83 RT. 012 RW. 003
Kelurahan Kedaung, Kaliangke, Jakarta Barat
Telp: (021) 23095745
e-mail: harianjayapos@yahoo.co.id
Website: www.harianjayapos.com

Pemimpin Umum:
Drs. John Hotman Malau, M.Si
Wakil Pemimpin Umum:
Leonardus Pasaribu, SH.

Pemimpin Redaksi/P. Jawab: Toni Limbong, SH.
Pemimpin Perusahaan: Febri Oloan Seim Brando, S.Ak
Wakil Pemimpin Redaksi : Anrico Pasaribu, ST., SH.
Sekretaris Redaksi: Jaya Hasni S.
Redaktur Pelaksana: Pahotan Sinaga
Manager Pemasaran/Iklan: Nadia Margaretha

DEWAN REDAKSI:
Toni Limbong, SH, Anrico Pasaribu,ST, SH
Pahotan Sinaga, Dede Rostini

REDAKTUR EKSEKUTIF:
A. Ristanto
REDAKTUR:
Dede Rostini
DESAIN GRAFIS/IT:
Agus Wiro
PHOTO GRAPHER
Hengki Lumbantoruan

Sumatera Utara: Rikkot Manik
Riau: .....
Sumatera Selatan: .....
Bangka Belitung: Yustami AI
Jambi: Kusuma Inrda Wijaya
Sumatera Barat: Zakirman
Banten: Guntur Sihombing
Bengkulu: Japri
DKI Jakarta: Jama Berutu
Lampung: Suhaili
Jawa Tengah: M. Sofi
Jawa Barat: Hendry Hutagalung
Jawa Timur: Wiro Utomo
Sulawesi Selatan: Muh. Hakim
Kalimantan Tengah: Mandau Suwandi
Sulawesi Tengah Heriyanti
Kalimantan Barat : Suhardi
Kalimantan Timur .....

STAF REDAKSI:
JS. Purba | Jama Berutu | Jitro Limbong | Gurning | Jiston Sitohang | Sumihar, SH | Michael J Manurung | Bedman Tambunan
LITBANG:
Lamser Limbong
SIRKULASI:
Nelson Hutapea
PENASEHAT HUKUM:
Andar Situmorang SH. MH. | Anrico Pasaribu, ST., SH.

PENASEHAT:
Tom Pasaribu, Andar Situmorang, SH.
ML. Carlos Melgares Varon, P.hd.
Dr. Ronsen Pasaribu, SH, MH.

REKENING BANK:
- Bank Rakyat Indonesia (BRI) KCP Pramuka
Rek. No. : 1148-01-000156-30-1
a/n PT Media Cipta Jaya Selaras
- Bank Rakyat Indonesia (BRI) KCP Daan Mogot
Rek. No. : 0379-01-002054-50-7
a/n Toni Limbong
- Bank BCA Cab. Daan Mogot
Rek. No. : 1984084008
a/n Toni Limbong

PERCETAKAN: PT. Aliansi Temprina Nyata Grafika
Alamat: Jl. Raya Benda No. 26C, Rawa Bokor, Kota Tangerang
Telp: (021) 5553472, Fax: (021) 5553473
(Isi diluar tanggungjawab percetakan)

Pemkot Jakarta Timur Gerakan Pembagian Bendera, Waga Diajak Perkuat Patriotisme

Jakarta, Jaya Pos

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur resmi mencanangkan Gerakan Pembagian Bendera Merah Putih menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia.

Gerakan tersebut bertujuan mengoptimalkan potensi wilayah dan mengajak seluruh elemen masyarakat memerahkan sekaligus memutihkan setiap sudut Jakarta Timur sebagai wujud kecintaan dan kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pencanangan dilakukan dalam Apel Senin Pagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di halaman Kantor Wali Kota Administrasi Jakarta Timur, Senin (10/8/2026). Ditandai dengan penyerahan bendera Merah Putih dari Wali Kota Administrasi Jakarta Timur Munjirin kepada 10 camat di lingkungan Kota Administrasi Jakarta Timur.

Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut arahan pemerintah pusat melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400.10.1.1/5191/SJ tanggal 10 Juli 2026 dan surat pembaruan Nomor 400.10.1.1/5499/SJ tanggal 27 Juli 2026 tentang Gerakan Pembagian Bendera Merah Putih Tahun 2026.

Penyerahan bendera Merah Putih dari Wali Kota Administrasi Jakarta Timur Munjirin kepada 10 camat di lingkungan Kota Administrasi Jakarta Timur.(dok hms)

Dalam arahannya yang dibacakan Munjirin, Menteri Dalam Negeri menekankan pentingnya dukungan dan partisipasi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) dalam menyukseskan gerakan tersebut.

SKPD/UKPD diminta menggerakkan, mengimbau, dan mengajak instansi terkait, lembaga, pelaku usaha, organisasi kemasyarakatan, serta kelompok masyarakat di wilayah masing-masing untuk berpartisipasi dalam Gerakan Pembagian Bendera Merah Putih.

Menurut Munjirin, gerakan tersebut bukan sekadar kegiatan seremonial untuk menyemarakkan peringatan HUT ke-81 RI, tetapi juga menjadi momentum memperkuat semangat gotong royong, persatuan, patriotisme, dan kecintaan terhadap Tanah Air.

"Pencanangan ini menjadi tanda awal kerja bersama kita, mengoptimalkan segala potensi yang ada di Kota Administrasi Jakarta Timur. Mari kita 'merah putihkan' wilayah yang kita cintai ini, penuhi setiap sudut lingkungan dengan bendera kebanggaan bangsa sebagai bukti kesetiaan dan kecintaan kita kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia," kata Munjirin.

Ia berharap gerakan tersebut dapat dilaksanakan secara masif hingga tingkat masyarakat, sehingga seluruh wilayah Jakarta Timur turut menyemarakkan suasana peringatan Kemerdekaan Indonesia.

Dengan dimulainya Gerakan Pembagian Bendera Merah Putih, pemerintah mengajak seluruh unsur masyarakat untuk bersatu dan bergotong royong menciptakan suasana kemerdekaan yang semarak di seluruh wilayah Jakarta Timur.

Gerakan tersebut diharapkan tidak hanya memperindah lingkungan dengan nuansa Merah Putih, tetapi juga membangkitkan semangat persatuan dan nasionalisme masyarakat dalam menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026.

(Jiston)

Lima Pejabat Polres Maros Berganti, Kapolres Devi Sujana Beri Pesan Tegas kepada Pejabat Baru

Maros, Jaya Pos

Lima pejabat utama di jajaran Polres Maros resmi berganti.

Pergantian tersebut ditandai dengan upacara Serah Terima Jabatan (Sertijab) yang dipimpin langsung Kapolres Maros AKBP Devi Sujana, S.H., S.I.K., M.H., di Aula Promoter Mapolres Maros, Senin (10/8/2026).

Sejumlah jabatan strategis mengalami pergantian, mulai dari Kabag SDM, Kasat Lantas hingga tiga posisi Kapolsek.

Mutasi ini merupakan bagian dari dinamika organisasi Polri sekaligus penyegaran dan pengembangan karier personel.

Lima pejabat yang melaksanakan Sertijab yakni:

1. Kabag SDM Polres Maros, dari Kompol Jumanto Agung, S.H., M.H., kepada AKP Makmur, S.H., M.M.
2. Kapolsek Turikale, dari AKP Syaifuddin, S.Sos., M.M., M.Si., kepada Kompol Muhammad Yusuf, S.Sos., M.M.
3. Kapolsek Mallawa, dari Iptu Muhammad Yusuf.M kepada Iptu Udin.
4. Kapolsek Tanralili, dari Iptu Askar, S.Sos., kepada Ipda Romi Sugara, S.K.M., M.H., CPHR., CBA.
5. Kasat Lantas Polres Maros, dari AKP Andi M. Takbir Akbar Amnur, S.E., kepada Iptu Suwardi.

Kapolres Maros AKBP Devi Sujana saat sertijab. (Foto/Heril)

Dalam amanatnya, Kapolres Maros AKBP Devi Sujana menyampaikan apresiasi kepada pejabat lama yang telah menjalankan tugas dan memberikan kontribusi bagi institusi selama bertugas di Polres Maros.

Menurutnya, mutasi jabatan merupakan hal yang biasa dalam tubuh Polri.

"Mutasi jabatan adalah hal yang wajar dalam institusi Polri, ini adalah penyegaran dan juga bentuk promosi," kata AKBP Devi Sujana.

Kapolres juga menyampaikan terima kasih kepada pejabat lama atas pengabdian dan kinerja yang telah diberikan.

"Kepada pejabat lama, saya ucapkan terima kasih atas pengabdian dan kinerja yang telah dicurahkan. Semoga sukses di tempat tugas yang baru," ujarnya.

Pesan Tegas untuk Pejabat Baru

Tak hanya memberikan apresiasi kepada pejabat lama, AKBP Devi Sujana juga memberikan sejumlah pesan kepada pejabat yang baru.

Ia meminta seluruh pejabat baru segera beradaptasi dengan lingkungan kerja dan memahami karakteristik wilayah hukum masing-masing.

Pejabat baru juga diminta melanjutkan program-program yang telah berjalan serta menghadirkan inovasi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

"Kepada pejabat yang baru, saya perintahkan untuk segera menyesuaikan diri, kenali lingkungan, dan lanjutkan serta kembangkan capaian yang sudah ada," tegasnya.

Kapolres meminta pejabat baru menunjukkan loyalitas dan dedikasi terbaik dalam menjalankan amanah.

"Tunjukkan loyalitas dan dedikasi terbaik demi kemajuan Polres Maros dan pelayanan kepada masyarakat," lanjutnya.

Ia berharap pergantian sejumlah pejabat tersebut dapat semakin memperkuat kinerja jajaran Polres Maros, khususnya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).

Rangkaian Sertijab kemudian ditutup dengan tradisi kenal pamit secara sederhana dan penuh kekeluargaan.

Tradisi tersebut menjadi penanda resmi pergantian kepemimpinan pada lima jabatan strategis di jajaran Polres Maros. **(Hakim)**

Perwakilan Sumatera Utara: Rikkot Manik (Kepala), Ir Rudy Limbong MT (Wakil), Isnani, Lenon Radot Tampubolon, Erwinsa Sinaga, Hunter Dominikus Samosir | **Biro Medan:** | **Biro Binjai:** Siti Fatimah Hasibuan (Kepala) | **Biro Langkat:** Abdul Rahman (Kepala) | **Biro Deli Serdang:** Horasman Limbong (Kepala), Rahmadani | **Biro Simalungun/P. Siantar:** Jhon Edward Sargih SH (Kepala), Ramlan Sirait | **Biro Labuhanbatu/Labusel:** Gatti H Tumanggor (Kepala) **Biro Belitung/Belitung Timur:** Yustami AI (Kepala) | **Biro Padang Panjang:** Zakirman (Kepala), Denny Alinur | **Biro Bukittinggi :** Zakirman (Kepala), Denny Alinur **| Biro Tanjab Barat:** Kesuma Indrawijaya (Kepala) | **Biro Muko Muko:** Japri (Kepala), Aldo Surya Elwasa Putra | **Biro Way Kanan:** Suhaili (Kepala) | **Biro Lampung Timur: -** | **Perwakilan Banten:** | **Biro Padeglang:** Sofyandri | **Biro Kabupaten Tangerang:** Guntur Sihombing (Kepala), Abdullah Muhadi | **Biro Tangerang Selatan:** Ferry Dwi Darmawan (Kepala) | **Perwakilan Jawa Barat:** Hendry Hutagalung (Kepala) | **Biro Bekasi:** Sabar Sinaga (Kepala) | **Biro Kabupaten Sukabumi:** Yudi Suyudi (Kepala) | **Biro Kab Bandung:** Hendry Hutagalung (Kepala) | **Biro Ciamis/Pengandaran/Banjar:** Mamay (Kepala) | **Biro Garut:** Hartono (Kepala) | **Biro Pekalongan:** M Sofii (Kepala) | **Biro Kab Mojokerto :** Nur As'adi (Kepala), Buaji **| Biro Trenggalek:** Heru Wijaya SPd (Kepala) **| Biro Sidoarjo:** Wiro Utomo (Kepala) | **Biro Pasuruan: Wiro Utomo** (Kepala) | **Perwakilan Kalimantan Barat :** Suhardi | **Perwakilan Kalimantan Tengah:** Mandau Suwandi (Kepala), Yuel | **Biro Tolitoli:** Hariyanti (Kepala) | **Perwakilan Sulawesi Selatan:** Muh Hakim (Kepala)

Tinjau PPLI, Menteri LH Dorong Pengelolaan Limbah B3 Berbasis Traceability dari Hulu hingga Hilir

Bogor, Jaya Pos

Menteri Lingkungan Hidup (LH) Jumhur Hidayat meninjau fasilitas pengelolaan limbah PT Prasadha Pamunah Limbah Industri (PPLI) di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (13/8/2026). Dalam kunjungannya, Jumhur menilai PPLI sebagai salah satu pionir sekaligus benchmark dalam pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) secara terintegrasi di Indonesia.

Menteri Lingkungan Hidup (LH) Jumhur Hidayat meninjau fasilitas pengelolaan limbah PT Prasadha Pamunah Limbah Industri (PPLI) di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (13/8/2026)(dok hengki)

Dalam kesempatan tersebut, Jumhur menekankan pentingnya membangun sistem pengelolaan limbah B3 yang memiliki keterlacakan (traceability) secara menyeluruh, mulai dari limbah dihasilkan hingga pengolahan dan pengelolaan residu pada tahap akhir.

Menurutnya, pengelolaan limbah B3 tidak cukup hanya memastikan limbah diterima oleh fasilitas pengolahan. Setiap tahapan harus dapat ditelusuri dan dipertanggungjawabkan sehingga keberadaan dan pergerakan limbah dapat diketahui secara jelas.

Menurut Jumhur, keterlacakan juga menjadi instrumen penting untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan limbah. Sistem harus mampu mengidentifikasi apabila terdapat limbah yang tidak sampai kepada pengolah yang semestinya maupun ketidaksesuaian antara volume limbah yang diterima dengan hasil pengolahan dan residunya.

Dalam konteks tersebut, Jumhur melihat pengalaman PPLI selama lebih dari tiga dekade dapat menjadi salah satu referensi dalam memperkuat sistem pengelolaan limbah nasional. PPLI memiliki fasilitas dan pengalaman yang mencakup rangkaian pengelolaan limbah, mulai dari penerimaan, pengolahan, hingga pengelolaan residu.

Karena itu, Jumhur berharap praktik-praktik baik dari pengelola limbah yang telah memiliki sistem, teknologi, dan infrastruktur yang memadai dapat menjadi referensi untuk memperkuat ekosistem pengelolaan limbah B3 di Indonesia.

Presiden Direktur PPLI menyampaikan apresiasi atas perhatian Menteri LH terhadap pentingnya penguatan sistem pengelolaan limbah B3 secara menyeluruh. Menurutnya, kunjungan tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha dalam membangun tata kelola limbah B3 yang aman, tertib, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam hal ini, Kementerian Lingkungan Hidup memiliki peran penting dalam memastikan pengawasan dan penegakan hukum berjalan secara konsisten.

Pengawasan, menurut Jumhur, tidak boleh berhenti pada aspek administratif, tetapi harus mampu memastikan bahwa ketentuan yang berlaku benar-benar diterapkan dalam praktik pengelolaan limbah di lapangan.

Bagi PPLI, konsistensi dalam penerapan regulasi juga penting untuk menciptakan level playing field dalam industri pengelolaan limbah. Pelaku usaha yang telah berinvestasi dalam teknologi, fasilitas, sumber daya manusia, sistem pengendalian, dan pemenuhan regulasi perlu berada dalam lingkungan usaha dengan standar kepatuhan yang sama.

PPLI menilai penguatan pengawasan dan penegakan hukum bukan hanya berkaitan dengan pemberian sanksi, tetapi juga merupakan bagian penting dalam membangun industri pengelolaan limbah yang sehat, bertanggung jawab, dan memberikan perlindungan yang optimal bagi lingkungan serta masyarakat. Prinsip tersebut sejalan dengan narasi penguatan compliance dan level playing field dalam pengelolaan limbah B3.

Selain memastikan keterlacakan dan kepatuhan, Jumhur menekankan bahwa proses pengolahan harus mampu mengendalikan risiko pencemaran dan menghasilkan emisi seminimal mungkin. Menurutnya, keberhasilan pengelolaan limbah tidak dapat hanya diukur dari apakah limbah telah dibakar, diolah, atau dimanfaatkan, tetapi dari seberapa aman proses tersebut bagi manusia dan lingkungan.

Dengan demikian, pengelolaan limbah B3 harus benar-benar menjadi solusi lingkungan dan tidak memindahkan risiko pencemaran dari satu media lingkungan ke media lainnya.

Secara khusus, Jumhur menyoroti pentingnya memastikan limbah medis yang telah masuk dalam sistem pengelolaan benar-benar sampai kepada pengolah yang bertanggung jawab. Dengan demikian, proses pengolahan dapat dipantau dan residu yang dihasilkan tetap berada dalam sistem pengawasan hingga tahap akhir.

Menurut PPLI, prinsip tersebut memperkuat pentingnya pendekatan end-to-end dalam pengelolaan limbah B3. Pengawasan tidak seharusnya berhenti ketika limbah diterima atau setelah proses pengolahan selesai, tetapi perlu mencakup hasil pengolahan, produk yang dihasilkan, serta residu hingga pengelolaan akhirnya.

Setiap limbah B3 harus dapat ditelusuri sejak dihasilkan, dikirim, diterima dan diolah hingga residunya dikelola pada tahap akhir. Seluruh proses tersebut perlu didukung oleh neraca limbah yang dapat diverifikasi sehingga aliran limbah dapat dipastikan secara transparan dan akuntabel. **(D2)**

Polres Binjai Ungkap Kasus Pembuangan Bayi ... *Halaman 7*

Jalan Sultan Hasanuddin, Senin (10/8/2026). Kegiatan tersebut menjadi bagian dari komitmen kepolisian dalam menciptakan keamanan dan ketertiban serta memberikan rasa aman kepada masyarakat.

Salah satu kasus yang berhasil diungkap adalah pembuangan bayi yang terjadi di Jalan Aiptu Radiman, Kecamatan Binjai Kota, pada Minggu, 26 Juli 2026. Dalam kasus tersebut, polisi mengamankan dua orang terduga pelaku berinisial SS (55), perempuan, dan RD (31), laki-laki.

Keduanya diamankan petugas di Jalan Samanhudi, Kecamatan Binjai Selatan, pada Jumat 31 Juli 2026. Polisi selanjutnya melakukan proses penyidikan untuk mengungkap secara menyeluruh keterlibatan kedua orang tersebut dalam kasus pembuangan bayi.

Selain itu, Satreskrim Polres Binjai juga mengungkap kasus pencurian dengan kekerasan (Curas) dengan tersangka berinisial AI (31). Berdasarkan hasil pemeriksaan, tersangka mengaku telah melakukan aksi pencurian sebanyak 13 kali di sejumlah tempat kejadian perkara (TKP) yang berbeda.

Polisi juga mengungkap kasus pencurian dengan pemberatan (Curat) yang terjadi di Jalan Dr. Wahidin, Kecamatan Binjai Timur, pada Senin 13 Juli 2026.

Dalam kasus tersebut, petugas menangkap tiga tersangka masing-masing berinisial H (36), A (40), dan L (43). Ketiganya diamankan pada Selasa 4 Agustus 2026, di Kelurahan S. M. Rejo, Kecamatan Binjai Timur.

Sementara itu, dalam operasi penyakit masyarakat, Polres Binjai mengungkap 27 kasus dengan 34 orang pelaku. Pengungkapan tersebut meliputi satu kasus perjudian, 16 kasus premanisme/ pungutan liar (pungli), sembilan kasus minuman keras (miras), serta satu kasus prostitusi/perzinahan.

Kapolres Binjai menegaskan bahwa keberhasilan pengungkapan berbagai kasus tersebut tidak terlepas dari peran serta masyarakat yang memberikan informasi dan membantu pihak kepolisian.

"Untuk itu kami terus berkomitmen memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat dan akan terus memberantas aksi kejahatan lainnya di wilayah hukum Polres Binjai," Tegas Kapolres.

Polres Binjai juga mengajak masyarakat untuk terus berperan aktif menjaga keamanan lingkungan serta memberikan informasi kepada kepolisian apabila mengetahui adanya dugaan tindak pidana. Sinergi antara masyarakat dan aparat penegak hukum dinilai penting dalam menciptakan situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif di Kota Binjai.

(Fatimah)

Wakil Bupati Deli Serdang Tinjau ..... *Halaman 7*

kat antara Kabupaten Deli Serdang dan Kabupaten Karo.

Lom Lom bersama jajaran meninjau sejumlah titik jalan sekaligus melihat kondisi infrastruktur dan akses yang digunakan masyarakat untuk menjalankan aktivitas sehari-hari.

Menurut Lom Lom, peninjauan lapangan penting dilakukan untuk memperoleh gambaran kondisi sebenarnya. Hasilnya akan menjadi bahan kajian pemerintah daerah dalam menentukan langkah penanganan sesuai kebutuhan dan skala prioritas.

"Dengan turun langsung ke lapangan, kita dapat melihat kondisi yang sebenarnya. Ini menjadi bahan bagi pemerintah daerah untuk melakukan kajian lebih lanjut terkait kebutuhan penanganan jalan tersebut," ujar Lom Lom.

Dia mengatakan, kondisi jalan yang memadai tidak hanya mendukung mobilitas warga, tetapi juga berperan dalam memperlancar distribusi barang dan jasa.

Terlebih, Kecamatan STM Hulu memiliki potensi di sektor pertanian dan perkebunan. Infrastruktur jalan yang baik dinilai dapat membantu memperlancar distribusi hasil produksi masyarakat.

"Jalan ini tidak hanya berkaitan dengan akses transportasi masyarakat, tetapi juga berkaitan dengan aktivitas ekonomi. Kalau aksesnya baik, tentu mobilitas masyarakat dan distribusi hasil pertanian maupun perkebunan akan semakin lancar," katanya.

Lom Lom menegaskan, penanganan infrastruktur harus dilakukan berdasarkan perencanaan dan kajian teknis serta mengikuti ketentuan yang berlaku.

Selain itu, koordinasi dengan berbagai pihak diperlukan mengingat ruas Rumah Liang-Barus Jahe memiliki fungsi sebagai jalur penghubung antarwilayah.

"Semua kebutuhan infrastruktur akan kita lihat berdasarkan prioritas. Pemerintah akan berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat melalui pembangunan yang terencana dan berkelanjutan," ucapnya.

Pemerintah Kabupaten Deli Serdang selanjutnya akan melakukan inventarisasi dan pemetaan kebutuhan infrastruktur, termasuk ruas jalan yang menjadi akses penting bagi masyarakat.

Hasil survei terhadap jalan Rumah Liang-Barus Jahe akan menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan dan tindak lanjut penanganan jalan sesuai hasil kajian.

Dalam peninjauan tersebut, Lom Lom didampingi Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Janso Sipahutar, Plt Kepala Dinas Perhubungan Teuku Muhammad Yahya, Camat STM Hulu Sadar Purba, serta Camat Kutalimbaru Antonius Tarigan.

(Ramdani)

Kades Air Merbau: Jalan Desa Harus Dibangun Sempurna, Jadi Urat Nadi Perekonomian Warga

Belitung, Jaya Pos

Kepala Desa Air Merbau, Kato, menegaskan pembangunan infrastruktur jalan desa harus dilakukan secara optimal karena menjadi salah satu urat nadi perekonomian masyarakat. Jalan yang layak tidak hanya menunjang aktivitas pemerintahan dan pembangunan desa, tetapi juga mempermudah mobilitas warga serta distribusi hasil pertanian dan perkebunan.

Jalan Desa harus dibangun sempurna urat nadi ekonomi masyarakat Tahun 2028. (Foto/Yus)

Kato mengatakan Pemerintah Desa Air Merbau siap mengalokasikan anggaran yang bersumber dari Dana Desa (DD) untuk mendukung pembangunan infrastruktur sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa.

"Pembangunan jalan desa harus benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Karena itu, perencanaannya harus melibatkan masyarakat dan mengedepankan asas pemerataan serta kepentingan warga," kata Kato saat ditemui JAYA POS di ruang kerjanya, Kamis (13/8/2026).

Menurutnya, Desa Air Merbau memiliki empat dusun. Karena itu, pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan harus dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan skala prioritas dan kemampuan anggaran desa.

Ia mencontohkan rencana pembangunan jalan yang menghubungkan wilayah Air Merbau dengan kawasan Dusun Air Rembikang, Desa Air Seruk. Infrastruktur tersebut tidak hanya akan dirasakan manfaatnya oleh warga Air Merbau, tetapi juga masyarakat desa tetangga yang menggunakan akses tersebut untuk beraktivitas.

Salah satu ruas jalan yang menjadi perhatian pemerintah desa adalah jalan yang oleh masyarakat setempat dikenal sebagai Gang Kelenteng. Jalan sepanjang hampir dua kilometer itu sebelumnya pernah dibangun sekitar enam tahun lalu, namun kini kondisinya mengalami kerusakan cukup parah.

Selain badan jalan, jembatan penghubung antardesa di ruas tersebut juga mengalami kerusakan berat. Padahal, kawasan itu merupakan akses penting bagi masyarakat yang bermukim di sekitar jalan, termasuk warga yang memiliki kebun dengan berbagai tanaman seperti mangga, durian, ubi kayu, pisang, dan jeruk.

"Jalan ini sudah menjadi akses transportasi masyarakat selama bertahun-tahun. Karena kondisinya sekarang rusak berat, tentu harus kita rencanakan kembali agar bisa berfungsi secara maksimal," ujarnya.

Kato menjelaskan, untuk tahap awal, peningkatan jalan direncanakan dilakukan dengan pengurukan dan pelapisan menggunakan tanah puru. Sementara jembatan akan dibangun kembali dengan konstruksi yang memungkinkan aliran air tetap berjalan dengan baik.

Menurutnya, keberadaan saluran pengairan sawah dan tempat penggilingan padi di sekitar lokasi juga menjadi alasan penting untuk memperhatikan sistem drainase dalam pembangunan jembatan dan jalan tersebut.

"Rencananya akan kita masukkan dalam Musrenbang Desa tahun 2027. Jika perencanaan dan penganggarannya memungkinkan, pembangunan jalan dan jembatan tersebut ditargetkan dapat dilaksanakan pada 2028 sehingga kembali berfungsi dan memberikan manfaat bagi masyarakat," pungkas Kato.

Pemerintah Desa Air Merbau berharap pembangunan tersebut nantinya dapat memperlancar akses transportasi, meningkatkan aktivitas ekonomi warga, sekaligus memperkuat konektivitas antara wilayah desa dan desa-desa di sekitarnya. **(Yustami)**

Kepemimpinan SDN 105329 Wonosari Disorot .. *Halaman 7*

ngan bagian yang berlubang.

Kondisi tersebut patut menjadi perhatian karena fasilitas sekolah berkaitan langsung dengan kenyamanan dan keamanan proses belajar mengajar yang berlangsung setiap hari.

Tidak hanya bangunan, kondisi area depan sekolah juga terlihat belum tertata secara optimal. Sejumlah spanduk tampak terpasang dan bertumpuk di sekitar pintu masuk.

Hal lain yang cukup mencolok adalah kondisi sejumlah bendera merah putih yang terpasang di sepanjang dinding sekolah. Bendera-bendera tersebut terlihat kusam dan menguning sehingga warna merah putihnya tidak lagi tampak jelas.

Kondisi itu menjadi perhatian tersendiri mengingat Indonesia tengah memasuki momentum peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Persoalan yang muncul di SDN 105329 Wonosari dinilai tidak semestinya hanya dipandang sebagai polemik antara kepala sekolah dengan guru atau masyarakat.

Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang dinilai perlu turun langsung untuk memastikan kondisi sebenarnya di lapangan.

Pemeriksaan dapat mencakup kondisi bangunan dan sarana prasarana, pelayanan administrasi, hubungan kerja antara kepala sekolah dan guru, serta berbagai pengaduan yang sebelumnya disampaikan warga sekolah maupun masyarakat.

Langkah tersebut penting untuk memastikan proses pendidikan berjalan dalam suasana yang aman, nyaman, profesional, dan sesuai ketentuan.

Jika memang terdapat persoalan dalam tata kelola sekolah maupun kepemimpinan, tentu perlu ada evaluasi dan tindak lanjut. Sebaliknya, apabila berbagai tudingan yang beredar tidak terbukti, pihak sekolah juga harus diberikan ruang yang cukup untuk menyampaikan klarifikasi dan menunjukkan kondisi sebenarnya.

Kedatangan awak media ke SDN 105329 Wonosari dilakukan bukan untuk menghakimi atau menjatuhkan pihak tertentu. Konfirmasi merupakan bagian dari prinsip keberimbangan dalam pemberitaan.

Hingga berita ini diterbitkan, Kepala SDN 105329 Wonosari, YN, belum memberikan keterangan langsung mengenai berbagai pengaduan tersebut maupun kondisi sarana dan prasarana yang ditemukan di sekolah.

Masyarakat tentu berharap setiap pengaduan yang masuk tidak berhenti sebagai laporan, tetapi diverifikasi secara objektif dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

Sebab, sekolah bukan sekadar bangunan dan jabatan. Di dalamnya terdapat guru yang menjalankan tugas pendidikan, peserta didik yang membutuhkan lingkungan belajar yang layak, serta orang tua yang menitipkan harapan masa depan anak-anak mereka.

Karena itu, setiap persoalan di lingkungan sekolah semestinya diselesaikan melalui transparansi, komunikasi yang terbuka, keteladanan dalam kepemimpinan, serta mengutamakan kepentingan pendidikan dan peserta didik.

(HL)

Dua Pebalap BMX Muda Ciamis..... *Halaman 7*

BMX Championship 2026, Ozil yang memperkuat Ider Owl Edu Bike Ciamis turun di kelas RACE F8 – GIRLS (11–12) Final, " kata Mak Idoel, Senin (10/8).

Dikatakannya, Ozil mencatat waktu 36,379 detik dan harus puas berada di belakang pebalap Jepang, Chisa Koizumi dari Japan Cycling Federation, yang finis dengan waktu 35,539 detik. Posisi ketiga ditempati Nalinrat Pakaboeornkiat dari Project B Racing Team, Thailand, dengan catatan 36,812 detik. Sementara pebalap Indonesia lainnya, Quilla Fatimatuz Zahra dari YC BMX Happy Racing INA, finis di urutan keempat dengan waktu 37,508 detik. "Selisih waktu Ozil dengan sang juara hanya 0,840 detik. Hasil tersebut menjadi catatan tersendiri mengingat Koizumi merupakan pebalap Jepang yang memiliki reputasi kuat di kompetisi BMX internasional, " kata Mak Idoel sembari menegaskan bahwa pencapaian tersebut menjadi kebanggaan tersendiri bagi keluarga sekaligus menjadi motivasi bagi Ozil untuk terus berkembang.

Sehari setelah meraih perak di Asian BMX Championship, tandas Mak Idoel, Ozil kembali menunjukkan konsistensinya. Dalam Malaysia International BMX Race, Minggu (9/8), ia kembali mengamankan posisi kedua dan membawa pulang medali perak. Dua podium dalam dua hari tersebut menjadi penutup perjalanan Ozil di kelompok usia 11–12 tahun. "Tahun depan dia sudah 13 tahun, jadi tidak akan sekelas lagi dengan pesaingnya saat ini. Prestasi beruntun Ozil di Malaysia menjadi kebanggaan bagi Ciamis dan Jawa Barat. Raihan tersebut sekaligus menunjukkan adanya potensi atlet muda Indonesia yang mampu bersaing di lintasan BMX pada level internasional, " tandasnya.

(Mamay)

Polemik Tanah Harim Laut..... *Halaman 7*

usi agar ke depan tidak terjadi lagi hal seperti ini," tegasnya.

Citra mengaku telah membahas persoalan tersebut bersama Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi saat berada di Bandung. Dalam pertemuan itu, ia juga meminta dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, termasuk berkoordinasi dengan instansi pertanahan di tingkat provinsi.

Dikatakannya, Gubernur Jawa Barat telah menyampaikan agar persoalan tersebut ditangani sesuai ketentuan yang berlaku. Termasuk membuka peluang pembatalan sertifikat apabila terbukti berada di kawasan tanah harim laut. "Saya akan terus berkoordinasi dengan BPN terkait pernyataan Pak Gubernur. Untuk potensi pembatalan, tentu kami berharap bisa dilakukan. Mudah-mudahan bisa dibatalkan, tetapi seluruh prosesnya tetap harus ditempuh sesuai mekanisme yang berlaku karena itu merupakan kawasan harim laut," ujarnya.

Citra menyadari proses pembatalan dokumen kepemilikan tanah di BPN memerlukan mekanisme administratif dan hukum tersendiri. Namun, ia optimistis pembatalan tersebut dapat direalisasikan demi menegakkan aturan yang berlaku. "Semoga saja bisa dibatalkan. Prosesnya tetap harus kita tempuh dulu. Mudah-mudahan bisa segera dibatalkan, karena bagaimanapun itu adalah harim laut," pungkasnya. **(Mamay)**

LSM DPP TOPAN-RI Klaim Sulit Temui Kepala SDN Penjaringan 06 soal Dana BOS-BOP

Jakarta, Jaya Pos

Lembaga Swadaya Masyarakat Dewan Pimpinan Pusat Tim Operasional Penyelamatan Aset Negara Republik Indonesia (LSM DPP TOPAN-RI) mengaku kesulitan menemui Kepala SDN Penjaringan 06, Jakarta, untuk meminta klarifikasi terkait penggunaan anggaran BOS dan BOP Tahun Anggaran 2023-2025.

Ketua tim konfirmasi LSM DPP TOPAN-RI mengatakan pihaknya telah mengirimkan surat resmi bernomor 40/LP/DPPTOPAN-RI/IV/2026. Surat tersebut berisi permintaan penjelasan mengenai sejumlah item penggunaan anggaran sekolah yang dinilai perlu diklarifikasi.

Menurutnya, tim LSM telah beberapa kali mendatangi SDN Penjaringan 06. Namun, kepala sekolah disebut belum dapat ditemui.

SDN Penjaringan 06, Jakarta(dok ist)

"Kami sudah hampir tiga minggu berupaya melakukan konfirmasi secara langsung, namun hingga saat ini kepala sekolah belum dapat ditemui," ujar perwakilan LSM DPP TOPAN-RI kepada wartawan, Rabu (12/8/2026).

Dalam surat konfirmasi tersebut, LSM DPP TOPAN-RI meminta penjelasan terkait sejumlah kegiatan pemeliharaan dan pengadaan barang yang menggunakan anggaran BOS maupun BOP.

Beberapa di antaranya yakni pemeliharaan kamar mandi/WC peserta didik menggunakan anggaran BOP 2024. LSM meminta rincian terkait pekerjaan perbaikan keramik, penggantian closet duduk dan jongkok, pemasangan granit, penggunaan mortar dan semen, hingga biaya tenaga kerja.

Mereka juga mempertanyakan pekerjaan perbaikan plafon kelas lantai 3 yang mencakup penggunaan compound, dempul, gypsum board, paku, serta biaya kepala tukang kayu.

Selain itu, LSM meminta klarifikasi mengenai penggantian keramik di area samping aula sekolah yang disebut menggunakan anggaran BOP 2024.

Penggunaan anggaran BOS 2023 untuk pemeliharaan taman dan lapangan melalui kegiatan dekorasi taman juga masuk dalam permintaan konfirmasi.

Pada pos pengadaan barang, LSM DPP TOPAN-RI meminta penjelasan mengenai pengadaan printer laser color pada 2023, termasuk merek barang yang dibeli.

Mereka juga mempertanyakan pengadaan laptop dengan spesifikasi Intel Core i3-4010U pada 2023, khususnya terkait kesesuaian harga pembelian dengan harga pasar.

Sementara pada anggaran BOP 2025, LSM meminta informasi terkait pembelian 45 unit kursi kerja staf/kursi rapat. Klarifikasi yang diminta meliputi merek barang dan bukti penerimaan barang.

Permintaan konfirmasi lainnya berkaitan dengan pemeliharaan ruang kelas, termasuk aksesori pintu dan jendela, kaca bening, keramik, pasir, serta biaya pekerjaan sektor bangunan dan pekerjaan umum.

LSM DPP TOPAN-RI juga meminta dokumentasi foto sebelum dan sesudah pekerjaan untuk sejumlah kegiatan tersebut. Dokumentasi diminta dilengkapi tanggal dan keterangan pelaksanaan pekerjaan.

Menurut perwakilan LSM, permintaan tersebut merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial masyarakat terhadap penggunaan anggaran pendidikan yang bersumber dari keuangan negara.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak SDN Penjaringan 06 belum memberikan tanggapan resmi terkait surat konfirmasi maupun sejumlah pertanyaan yang disampaikan LSM DPP TOPAN-RI.

Redaksi membuka ruang hak jawab dan hak klarifikasi kepada Kepala SDN Penjaringan 06 serta pihak terkait lainnya sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. **(Michael J Manurung)**

Perkuat Persaudaraan Bupati Serang Ramaikan Lomba HUT ke-81 RI

Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah.(dok hms)

Pandeglang, Jaya Pos

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kabupaten Serang menggelar senama bahagia dan berbagai perlombaan dalam rangka memeringati Hari Ulang Tahun (HUT) ke 81 Republik Indonesia (RI) di Halaman Pendopo Bupati Serang pada Rabu, 12 Agustus 2026. Tampak Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah turut meramaikan perlombaan bersama para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Sebelum mengikuti perlombaan, Bupati Serang bersama Wakil Bupati Serang Muhammad Najib Hamas, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Zaldi Dhuhana, para Staf Ahli Bupati dan Asda, dan para Direktur BUMD Kabupaten Serang dan para Kepala Cabang Perbankan serta ASN di lingkungan Pemkab Serang mengikuti senam bahagia.

"Jadi yang kita laksanakan adalah ada beberapa lomba tentu ini tujuannya selain untuk mempererat tali persaudaraan di antara para perangkat, para jajaran supaya lebih kompak, lebih erat, lebih semangat bekerja. Dan tentu yang lebih penting adalah dalam rangka menyambut hari Kemerdekaan RI ke 81 Tahun," kata Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah kepada wartawan.

Dengan memeringati hari kemerdekaan Republik Indonesia, Ratu Zakiyah sapaan Ratu Rachmatuzakiyah berharap semua elemen masyarakat juga bisa terus mengenang jasa para pehlawan dan memerkuat nilai-nilai nasionalisme. "Di samping itu juga tentunya untuk memperkuat persaudaraan, persatuan dan kesatuan diantara kita," tandasnya.

Ratu Zakiyah memastikan, meski saat ini tengah dilakukan perlombaan antar OPD sampai tingkat kecamatan namun untuk pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu, tetap berjalan seperti hari-hari biasa. "Tadi saya sampaikan juga bahwa kalaupun hari ini teman-teman melaksanakan kegiatan ini perwakilan sebenarnya dari beberapa OPD, tapi tetap pelayanan publik harus tetap di optimalkan dengan tidak mengurangi pelayanan yang lainnya," tegasnya.

"Jadi saya sampaikan juga semangat untuk mengikuti kegiatan ini, karena kita bersama-sama untuk menjaga kekompakan dan persaudaraan antar perangkat daerah dan kecamatan," sambung Ratu Zakiyah.

Selain di tingkat Kabupaten Serang, Ratu Zakiyah meyakini jika di tingkat Desa, RT dan RW dalam menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke 81 Tahun 2026 sama halnya melaksanakan berbagai kegiatan perlombaan.

Oleh karenanya ia berharap semua kegiatan bisa dilaksanakan dengan kondusif, tidak ada hal yang tidak di inginkan terlebih ada perseteruan antar desa karena ada merasa ketidakadilan atau merasa dicurangi dan lain-lainnya.

"Namun saya yakin dengan kebersamaan, dengan semangat persaudaraan saya yakin semuanya bisa diminimalisir. Oleh karena itu, selamat merayakan hari kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 Tahun," tuturnya.

Pada kesempatan tersebut, Ratu Zakiyah didampingi Najib Hamas dan sejumlah kepala OPD mengunjungi stand Cek Kesehatan Gratis (CKG) dan stand-stand Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).**(yan)**

1 UMKM Belitung Ikut Babel Expo 2026, Bawa 402 Kg Produk ke Jakarta

Belitung, Jaya Pos

Sebanyak 11 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) binaan Pemerintah Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, siap ambil bagian dalam Babel Expo 2026 yang digelar pada 12–16 Agustus 2026 di Trans Studio Mall Cibubur, Jakarta.

Belitung Siap Ikut Babel Expo 2026 Sebanyak 402 Kg, 30 Koli Produk Siap Bersaing DiTrans Studio Mart Cibubur Jakarta. (Foto/Yus)

Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan, dan Tenaga Kerja (DKUKMPTK) Kabupaten Belitung, Annyta, didampingi Kepala Bidang Koperasi dan UKM Edi Siswaya, mengatakan keikutsertaan UMKM Belitung merupakan bagian dari upaya memperluas pemasaran produk lokal ke tingkat nasional.

"UMKM yang ikut telah melalui proses kurasi dan verifikasi oleh tim dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Tim provinsi yang memiliki kewenangan menentukan UMKM yang dinilai layak untuk dilibatkan," kata Annyta kepada Jaya Pos, Kamis (13/8/2026).

Menurut Annyta, pihaknya telah menyampaikan data UMKM binaan sesuai dengan kebutuhan kegiatan, termasuk prestasi dan kualitas produk yang dimiliki. Produk yang dibawa juga telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan, termasuk sertifikasi halal.

Sebanyak 11 UMKM Belitung yang ambil bagian dalam Babel Expo 2026 membawa beragam produk unggulan, mulai dari makanan olahan, hasil laut, batik, kopi, minuman, hingga kerajinan.

Mereka terdiri atas Astuti dari UKM Dina Dini dengan produk keripik sukun, terasi, dan madu; Yudistira dari UKM Morenji dengan sirup jeruk kunci; Fajar Winingsih dari UKM DKM Aura dengan stik iding-iding, kacang bawang, dan keripik labu; serta Nurul Zuryati dari UKM Bepulin Belitong yang membawa produk batik.

Selanjutnya, Yupi dari UKM Adena membawa ketam isi; Verawati dari UKM Juvesnack dengan produk keripik, teri, peletek, dan kricu; Lenny dari UKM Hokylend dengan ketam isi dan otak-otak; Evawani dari UKM Allisa's Souvenir dengan produk kerajinan; Ida Sumaryana dari UKM Kanggo dengan serbuk jeruk kunci; Siti Aniffah dari UKM Mandakini dengan rengginang; serta Rachim dari UKM HIM Coffee yang membawa kopi Belitung.

Secara keseluruhan, produk UMKM Belitung yang dikirim untuk mengikuti kegiatan tersebut mencapai sekitar 402 kilogram yang dikemas dalam 30 koli.

Koordinator yang mendampingi UMKM Belitung sekaligus Kepala UPT PLUT DKUKMPTK, Fita, mengatakan keikutsertaan tersebut diharapkan menjadi kesempatan bagi pelaku UMKM untuk memperkenalkan produknya kepada pasar yang lebih luas.

Menurutnya, proses seleksi dilakukan berdasarkan kualitas produk, kapasitas produksi, perkembangan usaha, pemasaran, serta prestasi masing-masing pelaku UMKM.

(Yustami)

Proyek BPJN Kalbar Rp88 M di Ketungau Diapresiasi, Namun Disorot juga Soal Sumber Material Galian C

Kalbar, Jaya Pos

Proyek Jalan Nasional Pembangunan Jalan SP Balai Karangan – Rasau 1 dan Rasau 2 di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat senilai Rp88 miliar mendapat apresiasi dari masyarakat. Akses jalan ini memang sudah lama dinantikan warga di wilayah perbatasan.

"Kami bersyukur jalan ini dibangun oleh pemerintah, akses jalan ini sangat berpengaruh pada sektor perekonomian kami disini. Semoga bisa diselesaikan tanpa kendala," ungkap seorang warga Ketungau kepada Jaya Pos saat di lapangan.

Proyek Dikerjakan 2 Kontraktor dengan Skema Tahun Jamak. Berdasarkan pantauan Jaya Pos di lapangan, pekerjaan proyek sudah berjalan dan menunjukkan progres. Pelaksanaan proyek ini dibagi menjadi dua paket kontrak dengan dua penyedia jasa berbeda.

Paket pertama dikerjakan PT. ST dengan nilai kontrak Rp45,5 miliar. Paket kedua dikerjakan PT. NSM senilai Rp42,8 miliar. Proyek ini menggunakan skema multi years contract atau tahun jamak. Pengerjaan dimulai sejak Januari 2026.

Pembiayaannya bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2026 melalui Ditjen Bina Marga Kementerian PU. Satuan kerja pelaksananya adalah PPK Paralel Perbatasan Nanga Badau – Entikong – Aruk – Temajok BPJN Provinsi Kalimantan Barat.

Sorotan Soal Sumber Material Galian C Di sisi lain, ada pertanyaan masyarakat terkait sumber material yang digunakan.

Menanggapi hal tersebut, Jaya Pos telah melayangkan konfirmasi kepada pihak BPJN Kalbar melalui surat digital beberapa waktu lalu.

Namun hingga berita ini diterbitkan, pihak BPJN Kalbar belum memberikan tanggapan. Tim Jaya Pos masih mendalami asal-usul quarry galian C yang digunakan pada proyek strategis nasional ini.

(HARDI)

Ruas Jalan SP Balai Karangan - Rasau (Suhardi)

Wali Kota Banjar Launching BIAS Tahun 2026

Banjar, Jaya Pos

Wali Kota Banjar, Ir. H. Sudarsono, menghadiri Launching Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) Tahun 2026 di SDN 8 Banjar, Senin (11/8). Kegiatan ini menjadi upaya Pemerintah Kota Banjar dalam meningkatkan derajat kesehatan peserta didik melalui imunisasi rutin di sekolah.

Launching BIAS 2026 turut dihadiri Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjar, Kepala Dinas Pendidikan, Camat Banjar, Kepala UPTD Puskesmas Banjar 3, dan Kepala UPTD SDN 8 Banjar. Kolaborasi lintas sektor ini diharapkan dapat memperluas jangkauan dan memastikan pelaksanaan imunisasi berjalan lancar di seluruh Sekolah Dasar di Kota Banjar.

Pada BIAS 2026, Pemerintah Kota Banjar memberikan 3 jenis imunisasi kepada anak sekolah dasar, yaitu Imunisasi Campak Rubella, Tetanus Difteri dan HPV. Pemberian imunisasi akan dilakukan secara bertahap mulai bulan Agustus hingga November 2026. Program ini menyasar siswa SD sebagai bentuk pencegahan dini terhadap penyakit menular dan upaya membangun kekebalan kelompok.

Wali Kota Banjar, H. Sudarsono, menghadiri Launching Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) Tahun 2026 di SDN 8 Banjar. (Foto:Mamay)

Wali Kota Banjar mengapresiasi dukungan Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, tenaga kesehatan, dan pihak sekolah yang terlibat dalam menyukseskan BIAS. Ia mengajak orang tua dan masyarakat untuk mendukung program ini agar anak-anak Banjar tumbuh sehat, terlindungi, dan siap mengikuti proses belajar mengajar. Dengan cakupan imunisasi yang tinggi, diharapkan Kota Banjar dapat mewujudkan generasi yang sehat, cerdas, dan berkualitas. "Untuk mencetak generasi yang cerdas, tangguh, dan berdaya saing, syaratnya adalah anak-anak kita harus sehat. BIAS bukan sekadar agenda rutin tahunan, melainkan komitmen melindungi anak-anak dari penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, seperti difteri, tetanus, campak, rubella, hingga kanker leher rahim melalui imunisasi HPV," tegas Sudarsono.

Sudarsono juga menekankan pentingnya sinergi lintas sektor serta dukungan penuh orang tua.

Diakuinya, target utama adalah seluruh anak usia sekolah di Kota Banjar mendapatkan pelayanan imunisasi hingga 100%. Langkah ini menjadi penanda dimulainya pelayanan imunisasi bergulir hingga November mendatang demi masa depan anak-anak Banjar yang lebih sehat dan tangguh.

Kepala SDN 8 Banjar, Maharani Pramaesti, S.Pd., M.Pd., menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kepercayaan menjadikan sekolahnya sebagai lokasi launching. Pihaknya menyatakan dukungan penuh sekaligus mengapresiasi pelayanan tenaga kesehatan yang profesional.

Imunisasi berlangsung Agustus–November 2026 di seluruh SD/MI negeri maupun swasta, melalui 10 BLUD UPTD Puskesmas. Sasarannya adalah Kelas 1 Imunisasi Campak–Rubella (MR) serta DT, siswa perempuan Kelas 5 dan 6 Imunisasi HPV, kelas 2 dan 5 Imunisasi Td. Target cakupan di atas 95%, menuju 100%. **(Mamay)**